

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN  
TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL YANG  
TERDAFTAR DI BP2D KOTA MALANG)**

Disusun oleh:

**CHANDRY DYAH RATSMINASSIWI**

NIM. 135020301111093

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN  
TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL YANG  
TERDAFTAR DI BP2D KOTA MALANG)**

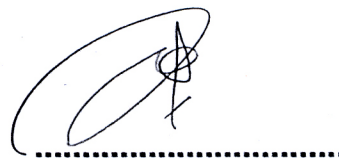
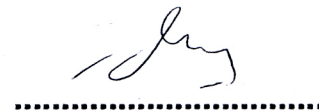
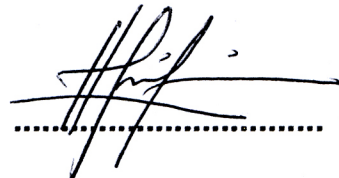
Yang disusun oleh :

Nama : Chandry Dyah Ratsminassiwi  
NIM : 135020301111093  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

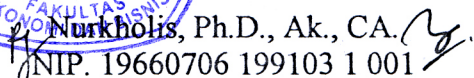
telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 April 2017 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hendi Subandi, SE.,MA.,Ak.  
NIP. 2012018 10620 1 001  
(Dosen Pembimbing)
2. Devy Pusposari, M.Si., Ak.  
NIP. 19751105 200312 2 001  
(Dosen Penguji 1)
3. Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.  
NIP. 19721005 200003 1 001  
(Dosen Penguji 2)



Malang, 2 Mei 2017  
Ketua Jurusan Akuntansi

  
Nurkholis, Ph.D., Ak., CA.  
NIP. 19660706 199103 1 001

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandry Dyah Ratsminassiwi  
NIM : 135020301111093  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,  
KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN  
TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL  
YANG TERDAFTAR DI BP2D KOTA MALANG)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 10 April 2017

Pembuat Pernyataan

*Chandry*



Chandry Dyah Ratsminassiwi

135020301111093

## **SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing dari:

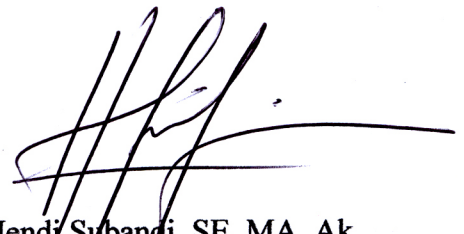
Nama : Chandry Dyah Ratsminassiwi  
NIM : 135020301111093  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA  
KECURANGAN, KECENDERUNGAN PERSONAL,  
DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN  
TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA  
WAJIB PAJAK HOTEL YANG TERDAFTAR DI BP2D  
KOTA MALANG)**

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Wajib Hotel yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, pada tanggal 27 Februari – 17 Maret 2017.

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 April 2017

Dosen Pembimbing



Hendi Sybandi, SE., MA., Ak.  
NIP. 2012018 10620 1 001

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Chandry Dyah Ratsminassiwi  
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 3 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Jayawijaya VI Nomor 6, RT/RW 003/XXIV,  
Mojosongo, Jebres. Solo.  
Email : Chandrydyahr@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

2001 sampai dengan 2007 : SDN Mojosongo VI Surakarta  
2007 sampai dengan 2010 : SMPN 7 Surakarta  
2010 sampai dengan 2013 : SMAN 4 Surakarta  
2013 sampai dengan 2017 : Universitas Brawijaya

### **Pengalaman Organisasi**

- Staff Minat Bakat Departemen Sumber Daya Manusia HMJA FEB UB (2014)
- Penanggungjawab Delegasi Departemen Sumber Daya Manusia HMJA FEB UB (2015)
- Bendahara Umum HMJA FEB UB (2016)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta nikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul: **“PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL YANG TERDAFTAR DI BP2D KOTA MALANG)”**. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama proses penyusunan Skripsi ini, penulis senantiasa memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselsaikannya penyusunan Skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Nurkholis, Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
2. Bapak Hendi Subandi, SE.,MA.,Ak. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada orang tua penulis tercinta, Bapak Sumina, S.IP., MH. dan Ibu Tri Riyatni Ratna Parwati, S.Kep. yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Kepada kakak tercinta Febrind Chandikya Nuria Majid, Nani Budi Utami, dan Sadham Aulia Rahman yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
5. Teruntuk Vina, Jelvi, Hafid, Frida, Faqih, Ega, Sidha, Endang, Imam dan teman-teman terdekat penulis lainnya yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam berbagi pikiran, keluh kesah, saling menyemangati dan berbagi kebahagiaan bersama.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang banyak memberikan bantuan saran maupun moral kepada penulis
7. Keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu, semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak.

Malang, 10 April 2017  
Penulis,

Chandry Dyah Ratsminassiwi  
135020301111093

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Teoritis .....	16
2.1.1 Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ) .....	16



2.1.2	Teori Atribusi .....	19
2.1.3	Teori Pemungutan Pajak .....	21
2.1.4	Pajak Daerah .....	23
2.1.5	Pajak Hotel .....	24
2.1.6	Sistem Pemungutan Pajak .....	24
2.1.7	Kepatuhan Pajak.....	25
2.1.8	Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) .....	26
2.1.9	Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	28
2.1.10	Kecenderungan Personal .....	30
2.1.11	Teknologi Sistem Perpajakan.....	31
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis Penelitian ....	33
2.2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	33
2.2.2	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap <i>Tax Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang .....	42
2.2.3	Pengaruh Kecenderungan Personal Terhadap <i>Tax Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang .....	45
2.2.4	Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang .....	46
2.3	Kerangka Penelitian .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>49</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	49
3.2	Tempat dan waktu Penelitian .....	50
3.3	Populasi dan Sampel .....	50
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	51
3.4.1	Variabel Bebas (Variabel Independen) .....	51
3.4.2	Variabel Terikat (Variabel Dependen).....	54
3.5	Data Penelitian .....	57
3.5.1	Jenis dan Sumber Data .....	57
3.5.2	Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.6	Pengolahan Data dan Analisis Data .....	62

3.6.1	Uji Validitas .....	62
3.6.2	Uji Reliabilitas.....	63
3.7	Metode Analisis Data .....	63
3.7.1	Uji Asumsi Klasik .....	63
3.7.2	Pengujian Hipotesis .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1	Gambaran Umum Responden.....	68
4.1.1	Jenis Hotel .....	69
4.1.2	Kepemilikan NPWPD .....	70
4.1.3	Jenis Kelamin .....	71
4.1.4	Usia.....	71
4.1.5	Pekerjaan .....	72
4.2	Uji Kualitas Data .....	75
4.2.1	Uji Validitas .....	73
4.2.2	Uji Reliabilitas.....	75
4.3	Statistik Deskriptif.....	77
4.3.1	Statistik Deskriptif Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ).....	77
4.3.2	Statistik Deskriptif Variabel Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) .....	79
4.3.3	Statistik Deskriptif Variabel Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) .....	82
4.3.4	Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Evasion</i> (Y) .....	85
4.3.5	Statistik Deskriptif Semua Variabel Dalam Penelitian .....	88
4.4	Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	89
4.4.1	Hasil Uji Normalitas.....	89
4.4.2	Hasil Uji Multikolonieritas.....	91
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	92
4.5	Hasil Pengujian Hipotesis .....	93
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	93
4.5.2	Hasil Uji F .....	94

4.5.3	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	95
4.5.3.1	Hasil Pengujian Hipotesis 1 .....	96
4.5.3.2	Hasil Pengujian Hipotesis 2 .....	96
4.5.3.3	Hasil Pengujian Hipotesis 3 .....	97
4.6	Pembahasan Hasil Penellitian .....	97
4.6.1	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ) Terhadap <i>Tax Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang.....	98
4.6.2	Pengaruh Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) Terhadap <i>Tax</i> <i>Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang .....	101
4.6.3	Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) Terhadap <i>Tax Evasion</i> Pada Pajak Hotel Di Kota Malang .....	104
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>		<b>108</b>
5.1	Kesimpulan.....	108
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	110
5.3	Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>112</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2013-2015 .....	4
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian .....	55
Tabel 3.2	Tambahan Pernyataan Kuesioner .....	60
Tabel 4.1	Hasil Penyebaran Kuesioner.....	68
Tabel 4.2	Kategori Responden Berdasarkan Jenis Hotel .....	70
Tabel 4.3	Kategori Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWPD.....	70
Tabel 4.4	Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
Tabel 4.5	Kategori Responden Berdasarkan Usia .....	71
Tabel 4.6	Kategori Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	72
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ) .....	73
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) .....	74
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) .....	74
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas <i>Tax Evasion</i> (Y).....	75
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ).....	76
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kecenderungan Personal ( $X_2$ ).....	76
Tabel 4.13	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ).....	76

Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Tax Evasion</i> (Y) .....	77
Tabel 4.15	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X <sub>1</sub> ).....	78
Tabel 4.16	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kecenderungan Personal (X <sub>2</sub> ) .....	80
Tabel 4.17	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Teknologi Sistem Perpajakan (X <sub>3</sub> ) .....	83
Tabel 4.18	Tabel Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tax Evasion</i> (X <sub>1</sub> ) .....	85
Tabel 4.19	Statistik Deskriptif Semua Variabel .....	88
Tabel 4.20	Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov.....	91
Tabel 4.21	Hasil Uji Muktikolonieritas .....	91
Tabel 4.22	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	94
Tabel 4.23	Hasil Uji F .....	95
Tabel 4.24	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> )	17
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas .....	90
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penyesuaian Kuesioner .....	117
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian .....	119
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i> .....	123
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ) .....	125
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) .....	126
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) .....	128
Lampiran 6	Hasil Uji Validitas <i>Tax Evasion</i> (Y) .....	130

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, KECENDERUNGAN PERSONAL, DAN TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK HOTEL YANG TERDAFTAR DI BP2D KOTA MALANG)**

**Oleh:**

**Chandry Dyah Ratsminassiwi  
135020301111093**

**Dosen Pembimbing**

**Hendi Subandi, SE., MA., Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. *Tax evasion* adalah perbuatan ilegal untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adanya kemungkinan tindakan *tax evasion* berakibat kerugian bagi pemerintah karena kontribusi pajak hotel yang di dapat tidak optimal. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 83 Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* tipe *judgment sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Sedangkan kecenderungan personal dan teknologi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecenderungan personal adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap *tax evasion*.

**Kata kunci:** Wajib Pajak Hotel, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kecenderungan Personal, Teknologi Sistem Perpajakan, *Tax Evasion*



## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF FRAUD DETECTION POSSIBILITY, TAX PAYER'S PERSONALITY, AND TAXATION SYSTEM TECHNOLOGY ON TAX EVASION (A STUDY ON HOTEL TAXPAYERS REGISTERED AT THE BP2D IN MALANG)**

**By:**

**Chandry Dyah Ratsminassiwi  
135020301111093**

**Supervisor:**

**Hendi Subandi, SE., MA., Ak.**

The objective of this research is to assess and to analyze the effect of fraud detection possibility, tax payer's personality, and taxation system technology on tax evasion committed by hotel business in Malang. Tax evasion is an illegal action of avoiding tax imposition and action of breaking tax regulation. There is a chance that tax evasion can inflict a financial loss for the government due to lower hotel tax contributions. The primary data of this study were collected through questionnaires distributed to 83 hotel taxpayers registered at the Local Tax Service Office (BP2D) in Malang. The sampling method used in this research is judgment-type purposive sampling. The hypothesis was analyzed using *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). The result of this research shows that fraud detection possibility is not significant in influencing hotel tax evasion in Malang. On the contrary, tax payer's personality and taxation system technology significantly influence hotel tax evasion in Malang, where the former factor plays the most influential part.

**Keywords: Hotel Taxpayers, Fraud, Tax Payers' Personality, Taxation System Technology, Tax Evasion**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya sendiri tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah pusat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber-sumber potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini akan tercapai jika potensi dan sumbedaya yang ada dapat dikelola dan dialokasikan dengan efektif dan efisien.

Setiap daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada berbagai sumber pendapatan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002: 55). Dari keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan suatu daerah, maka akan semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu juga sebaliknya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat pos anggaran pendapatan yang salah satunya adalah pajak daerah. Sebagai salah satu komponen PAD, pajak daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak yang dibayarkannya (Riduansyah, 2003). Pajak daerah memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan kontribusi pembiayaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu permasalahan terkait pajak harus dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat agar pendapatan dari pajak daerah tersebut dapat digunakan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber potensial guna kelangsungan dan kemajuan daerahnya. Sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur, Malang harus mampu mengembangkan sumber perekonomian dan segala potensi wisata untuk dapat meningkatkan nama Kota Malang. Jika hal tersebut mampu dilakukan oleh Kota Malang, maka akan berdampak pada pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dalam pengelolaannya di Kota Malang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah semakin membuka kesempatan bagi daerah-daerah khususnya Kota Malang untuk dapat mengembangkan segala potensi wisata yang dimiliki. Malang sebagai Kota Wisata memang tidak banyak memiliki obyek wisata alam, namun Malang memiliki banyak potensi yang lain seperti pusat perbelanjaan, tempat-tempat bersejarah dan kuliner. Selain itu Kota Malang terletak di posisi strategis yang diapit oleh Kota Batu dan Kabupaten Malang yang memiliki potensi wisata alam yang tinggi. Ketiga daerah tersebut sering disebut dengan daerah Malang Raya yang masing-masing daerahnya memiliki sektor wisata yang berbeda. Kota Malang lebih sebagai penyedia jasa dan akomodasi, seperti adanya restoran, cafe, hotel, travel, dan pusat perbelanjaan. Kota Batu unggul dalam wisata alam seperti pegunungan dan wisata buatan. Sedangkan Kabupaten Malang lebih unggul di wisata alamnya seperti pantai.

Dengan adanya potensi wisata yang dimiliki di Malang Raya membuat Kota Malang merasakan dampak perekonomian daerah dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Perkembangan Kota Malang yang cukup pesat membuat perubahan yang mengarah pada kota perdagangan dan jasa yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dan fasilitas pendukung juga berkembang cukup pesat seperti pertumbuhan hotel, cafe, restoran dan hiburan guna mengimbangi pertumbuhan penduduk yang diketahui dari Badan Pusat Statistik hingga tahun 2015 berjumlah 851.298 jiwa dan kunjungan wisata ke daerah Kota Malang menurut data dari Dinas Budaya dan Pariwisata pada tahun 2015 terdapat 8.754 untuk wisatawan mancanegara dan 3.376.722 wisatawan nusantara.

Dalam perkembangannya Kota Malang dituntut untuk mampu memperbaiki sarana dan prasarana serta pelayanannya dalam sektor wisata. Salah satu sarana akomodasi yang dibutuhkan adalah hotel sebagai penunjang dari sektor wisata di Kota Malang. Hotel merupakan penyedia jasa sebagai tempat persinggahan sementara yang digunakan oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang. Selain itu hotel juga menyediakan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan. Setiap tamu yang berkunjung ke hotel untuk menggunakan jasanya akan dikenakan pajak hotel. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 pasal 4 pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sifatnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, saat ini sebesar 20 persen pendapatan pajak daerah berasal dari sektor wisata, seperti pajak hotel, cafe, restoran, dan hiburan. Berikut disajikan tabel mengenai realisasi anggaran pajak hotel di Kota Malang dari tahun 2013-2015.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2013-2015**

Tahun	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
2013	Rp 11.115.346.405,15	Rp 13.934.800.659,87	125.37%
2014	Rp 17.169.937.868,68	Rp 25.069.025.889,87	146,01%
2015	Rp 22.131.094.351,27	Rp 31.828.275.728,43	143,82%

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, 2017.

Hingga akhir tahun 2015 diketahui bahwa pendapatan pajak daerah Kota Malang mencapai Rp 316 miliar yang di dalamnya terdapat pendapatan dari pajak hotel sebesar Rp 31,8 miliar atau sekitar 10,06 persen.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Malang diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 104 hotel berbintang dan non bintang. Dari jumlah kamar yang tersedia untuk hotel berbintang tingkat hunian kamar yang terjual sebesar 83,54% dan hotel non bintang 39,93% dengan rata-rata tingkat hunian selama 1,82 - 2,77 hari (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016). Dengan pertumbuhan yang semakin besar tersebut akan berdampak pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Malang yang meningkat. Pemerintah Kota Malang harus mampu mengolah sumber potensi dari pajak hotel tersebut yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Pemungutan pajak di Kota Malang masih mengalami berbagai masalah yang berpengaruh terhadap target anggaran yang diterima. Jika dilihat realisasinya memang sudah melampaui target yang ditentukan, akan tetapi realisasi tersebut masih memungkinkan untuk ditingkatkan kembali mengingat sumber potensi pajak hotel yang besar di Kota Malang.

Sistem pemungutan pajak merupakan komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan pemungutan pajak di Indonesia. Secara umum dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* (Resmi, 2013). Namun sejak adanya reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 salah satu perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia adalah sistem pemungutan *official assessment system* yang berubah menjadi *self assessment system*. Pada sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, menyetorkan dan melaporkan besarnya pajak terhutang sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang yang berlaku (Wahyuni, 2011). Namun belum semua potensi pajak digali dengan maksimal dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran pentingnya pemenuhan kewajiban pajak sebagai warga negara yang baik. Untuk itu diperlukan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi untuk dapat mengoptimalkan *self assessment system* (Suminarsasi, 2011).

Terobosan baru yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang adalah dengan adanya sistem pemungutan untuk wajib pajak hotel yang dapat menyetorkan pajak daerah melalui sistem online yang disebut dengan pajak online atau *E-Tax*. Wajib Pajak hotel tidak perlu menghitung besaran pajak yang akan dibayarkan, melainkan akan terhitung secara otomatis melalui sistem tersebut. Adanya sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak hotel dalam menyetorkan pajak daerah karena dirasa dengan sistem tersebut efektif untuk digunakan dan hal tersebut merupakan salah satu upaya Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk dapat mengurangi adanya potensi kecurangan pajak dan upaya untuk pemberantasan korupsi dari sektor pajak hotel.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam (Tuanakotta, 2016) yang menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *Fraud Tree* ini dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), dan pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent Statement*). *Fraudulent statement* ini biasa dilakukan oleh eksekutif di perusahaan untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*), pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Kasus inilah yang terjadi pada wajib pajak hotel dalam menyetorkan pajaknya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan cara memanipulasi laporan keuangan yang diberikan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Seperti yang dilansir pada laman berita pelita.or.id (Mon, 2016), menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ditemukan sebesar 70 persen wajib pajak hotel di Kota Malang diketahui menggelapkan pajak. Penarikan sistem penyetoran secara online pun masih minim digunakan sehingga wajib pajak hotel memilih menggunakan sistem manual dan menggunakan metode target dalam menghitung pajaknya. Adanya manipulasi pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak hotel, sehingga dalam menyetorkan pajaknya wajib pajak hotel tidak melaporkan sesuai jumlah kamar yang disewakan, melainkan hanya target dari setiap periodenya yang dilaporkan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.<sup>1</sup> Hal tersebut sangat merugikan pemerintah karena realisasi dari kontribusi pajak hotel yang di dapat seharusnya bisa lebih besar.

Keberadaan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak hotel untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* yang didasari oleh beberapa alasan seperti kurangnya sosialisasi pemerintah hingga keengganan wajib pajak yang lebih merasa tidak memperoleh kompensasi apapun dari pemerintah misalnya pengadaan fasilitas umum (Wahyuni, 2011). Togler (2007) dalam Yurika (2016) faktor utama lainnya yang menyebabkan munculnya tindakan *tax evasion* adalah beban pajak,

---

<sup>1</sup><http://www.pelita.or.id>, *Tujuh Puluhan Hotel di Malang Gelapkan Pajak*, Minggu, 18 Desember 2016.



ketidakjujuran, dan korupsi. Hal tersebut akan menimbulkan upaya dari wajib pajak yang dengan sengaja untuk menghindar dari kewajiban perpajakannya. Selain itu sistem pemungutan *self assessment* ini juga dapat berpotensi untuk memicu adanya kecurangan pajak dengan cara memberikan informasi yang palsu terkait laporan transaksi usaha hotel ataupun kecurangan pajak dengan cara bernegosiasi dengan petugas pajak yang ada di lapangan.

Menurut Yusmarwandi (2014) salah satu cara untuk mendeteksi kecurangan yang ada pada sektor perpajakan adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak seharusnya dilakukan secara rutin oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena wajib pajak merasa takut ketika diperiksa dan terbukti melakukan kecurangan maka denda yang dibayarkan jauh lebih besar daripada pajak yang seharusnya (Ayu, 2011).

Perilaku tindakan penggelapan pajak terjadi karena adanya perlawanan pajak dari wajib pajak seperti munculnya tindakan kecurangan untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menekan serendah-rendahnya pajak, ketidakadilan pada tarif pajak, maupun kurangnya sosialisasi dari petugas pajak mengenai aturan perpajakan. Hal

tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Untuk memprediksi perilaku tersebut dalam penelitian ini dapat menggunakan Teori Perilaku Terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB merupakan pengembangan dari model Teori Tindakan Beralasan atau *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan menambahkan satu konstruk baru yaitu kontrol perilaku persepsian atau *perceived behavior control* (Ajzen, 1991). Perilaku individu yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hidayat, 2010). Menurut Ajzen (1991) niat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the bahavior*), norma subyektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Wanarta (2014) dan Sari (2015) menyatakan bahwa model TPB terbukti mampu memberikan penjelasan mengenai sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang penggelapan pajak Ayu (2011) dan (Wahyuni, 2011). Ayu (2011) melakukan penelitian mengenai dampak persepsi efektivitas pemeriksaan pajak dalam menemukan kecurangan terhadap kecenderungan *tax evasion* wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Artinya, kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh dengan *tax evasion*. Sedangkan Wahyuni (2011) melakukan penelitian mengenai *tax evasion* : dampak dari *self assessment system*. Hasil dari

penelitian tersebut menjelaskan bahwa perlakuan dari *tax evasion* dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada wajib pajak tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga wajib pajak memiliki peluang untuk melakukan *tax evasion*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi adanya *tax evasion* dalam penelitian yang telah dilakukan salah satunya adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian Sari (2015) menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayu dan Hastuti (2009) tentang persepsi wajib pajak : dampak pertentangan diametral pada *tax evasion* wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Artinya, bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat *tax evasion* akan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak akan cenderung patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*), karena wajib pajak merasa takut ketika diperiksa dan terbukti melakukan kecurangan maka denda yang dibayarkan jauh lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayarkan.

Kecenderungan personal merupakan aspek dari diri pribadi wajib pajak baik secara pasif maupun aktif untuk melakukan perlawanan pajak. Dalam penelitian Yusmarwandi

(2014) yang menguji kecenderungan personal terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan di Kota Banda Aceh menunjukkan hasil jika kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) menunjukkan bahwa kecenderungan personal tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal tersebut disebabkan karena pada wajib pajak, meskipun faktor internal keinginan untuk melakukan *tax evasion* tinggi akan tetapi faktor eksternal ketakutan akan diperiksa lebih dominan. Sehingga kecenderungan personal bukan menjadi hal yang berpengaruh pada perilaku *tax evasion* wajib pajak.

Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang untuk meningkatkan kualitas layanan dan memudahkan wajib pajak hotel dalam menyetorkan pajaknya. Menurut Ayu dan Hastuti (2009) munculnya teknologi sistem perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan oleh pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion* yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurika (2016) menunjukkan hasil bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wajib pajak belum maksimal dalam menggunakan teknologi sistem perpajakan dan masih menggunakan sistem pembayaran manual. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Permatasari (2013) yang menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal

tersebut dikarenakan masih minimnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak. Semakin rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan dapat memicu semakin tingginya *tax evasion* di masyarakat.

Dengan adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu terkait variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti, menguji dan menganalisis kembali dengan alasan: *pertama*, penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi para wajib pajak hotel di Kota Malang mengenai adanya *tax evasion* pada pemungutan pajak hotel karena pada penelitian-penelitian sebelumnya masih jarang dilakukan. *Kedua*, hal yang mendasari untuk melakukan penelitian ini karena isu mengenai adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hotel di Kota Malang dan sedang dalam pemeriksaan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti memberi judul penelitian ini “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kecenderungan Personal, dan Teknologi Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion* Pemungutan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel Di Kota Malang)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang?
2. Apakah kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang?
3. Apakah teknologi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh 3 (tiga) variabel independen yang digunakan, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang yang telah terdaftar di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis pengaruh kecenderungan personal terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang.

3. Untuk menganalisis teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang timbul. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

#### **1. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memberikan informasi kepada pihak berwenang bahwa adanya kemungkinan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel di Kota Malang dalam melaporkan pajak ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dalam hal pengawasan pelaporan terkait pajak hotel di Kota Malang.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan dan informasi khususnya mengenai adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan wajib pajak hotel dalam menyetorkan pajak ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan ini penulis buat sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi serta beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

## **Bab III : Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

## **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

## **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

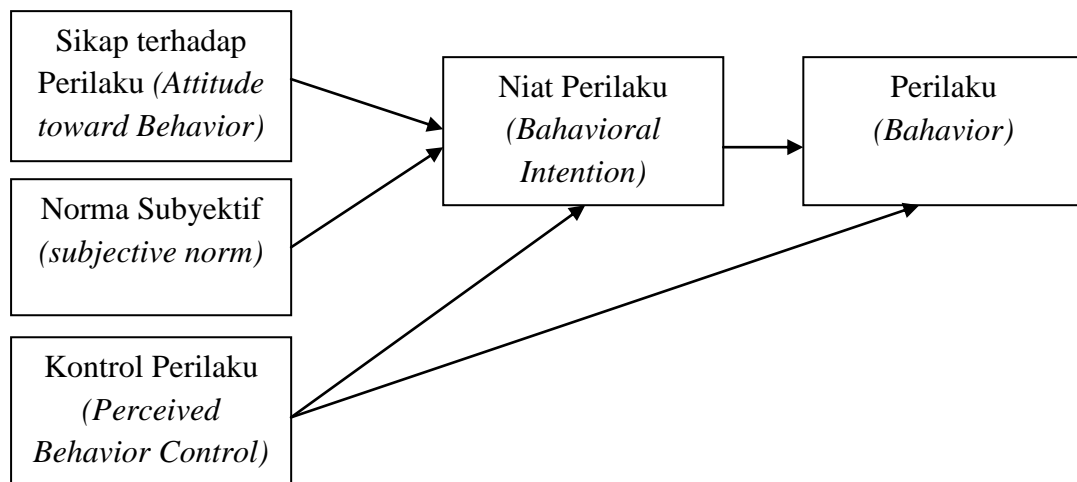
#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan niat perilaku individu yang memerlukan perencanaan. Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku dimana orang-orang yang memiliki tingkat yang tinggi terhadap kontrol kemauannya (*volitional control*) dan mengasumsikan bahwa semua perilaku adalah domain-domain dari personaliti dan psikologi sosial (Jogiyanto, 2008: 63).

Dalam *Theory of Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk melalui dua faktor sentral yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the bahavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*), sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menambahkan satu konstruk baru yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) (Ajzen, 1991). Konstruk tersebut ditambahkan pada TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya (Jogiyanto, 2008: 61). Model TPB dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Model Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**



Sumber: Jogiyanto (2008: 62)

Dalam teori ini menghubungkan antara keyakinan (*belief*), niat (*intention*), dan perilaku (*behavior*). Berbagai keyakinan terhadap suatu perilaku dapat dimiliki oleh seseorang, namun hanya sedikit keyakinan yang muncul mempengaruhi perilaku ketika seseorang dihadapkan oleh suatu kejadian tertentu. Sedikit keyakinan tersebutlah yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Faktor utama dalam TPB yang dapat mempengaruhi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Ajzen (1991: 191) keyakinan individu akan hasil dan evaluasi suatu perilaku (*behavior belief*). *Behavior belief* akan membentuk sikap (*attitude*) terhadap suatu perilaku (*attitude toward the bahavior*). Perilaku tersebut dapat memberikan respon positif atau negatif terhadap sesuatu yang terjadi. Ketika seseorang merasa mendapat manfaat yang diperoleh untuk dirinya maka dia akan cenderung memberikan respon positif. Begitu juga sebaliknya ketika seseorang merasa tidak terdapat manfaat yang diperoleh untuk dirinya, maka dia

akan cenderung memberikan respon negatif. Dalam penelitian ini sikap (*attitude*) terhadap perilaku penggelapan pajak akan menunjukkan bahwa seberapa besar keyakinan wajib pajak hotel untuk merespon hal negatif atau positif dalam melaporkan pajak hotel pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

2. Ajzen (1991: 195) keyakinan individu mengenai norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). *Normative belief* ini akan membentuk variabel norma subyektif (*subjective norm*) terhadap suatu perilaku. Norma subyektif ini berupa pandangan seseorang terhadap keyakinan orang lain atau adanya tekanan sosial yang akan mempengaruhinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Jogiyanto, 2008: 42). Dalam penelitian ini norma subyektif (*subjective norm*) digunakan untuk menunjukkan apakah wajib pajak hotel terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan penggelapan pajak pada pajak hotel di Kota Malang karena adanya pengaruh sosial, seperti adanya pandangan yang mempengaruhinya dari pemilik hotel, Wajib Pajak lain, aparat, pajak, konsultan pajak maupun lingkungan sekitar dari Wajib Pajak Hotel.
3. Ajzen (1991: 196) keyakinan individu mengenai hal-hal yang menghambat atau mendukung perilaku tersebut dan kesadaran akan kekuatan yang mempengaruhi perilakunya (*control belief*). *Control belief* akan mempengaruhi kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) terhadap suatu perilaku. Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) terjadi karena adanya faktor lain dari luar individu yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Semakin

besar kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) maka semakin besar dorongan atau niat seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan tersebut (Jogiyanto, 2008: 65). Dalam penelitian ini kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) dapat ditunjukkan dengan adanya keyakinan individu yang takut dengan adanya pemeriksaan pajak dikarenakan jika terbukti melakukan kecurangan maka sanksi denda yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak yang dibayarkan.

Secara keseluruhan keyakinan-keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) memproduksi suatu sikap (*attitude*) menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku, keyakinan-keyakinan normatif (*normative beliefs*) menghasilkan tekanan sosial atau norma-norma subyektif, dan keyakinan-keyakinan kontrol (*control beliefs*) akan memberikan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Bersama-sama, sikap (*attitude*) terhadap perilaku, norma-norma subyektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*) akan mengakibatkan niat perilaku (*behavioral intention*) dan yang selanjutnya akan menimbulkan perilaku (*behavior*) (Jogiyanto, 2008: 66). Sehingga dengan adanya sikap seseorang dalam berperilaku baik dalam memenuhi ketentuan perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak menjadi rendah (Sari, 2015).

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Teori Atribusi digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang. Teori ini dikembangkan oleh Heider (1958) untuk mencari penjelasan mengenai sebab akibat terjadinya peristiwa sosial, terutama pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Atribusi merupakan sebuah proses untuk menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik seseorang yang dilihat dari perilakunya. Dengan kata lain, teori atribusi ini merupakan suatu proses dimana seseorang berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa (John, Robert, dan Michael, 2005: 123). Sebab akibat terjadinya atribusi ini dikarenakan kecenderungan dari seseorang yang ingin tahu mengenai adanya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi atau terdapat sesuatu yang istimewa terjadi. Peristiwa buruk dan tidak menyenangkan juga menjadi penyebab atribusi muncul.

Heider (1958) menyebutkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha dan kekuatan eksternal (*eksternal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya kerumitan aturan atau keberuntungan. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu dalam pengambilan keputusan atau melalui perilaku yang ditunjukkannya. Menurut John, Robert, dan Michael (2005: 123) penentuan internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu keunikan, konsistensi, dan konsensus. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Kelley (1980) bahwa ketiga faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan seseorang untuk dapat menarik kesimpulan dari suatu perbuatan baik internal maupun eksternal. Keunikan (*distinctiveness*) akan menunjukkan sejauh mana individu bereaksi dengan cara yang sama terhadap situasi yang berbeda. Konsistensi merupakan tingkatan dimana seseorang akan menunjukkan reaksi yang sama dalam waktu yang

berbeda. Sedangkan konsensus menunjukkan tingkatan dimana seseorang akan memberikan reaksi yang sama pada suatu peristiwa.

Perilaku penggelapan pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Yurika, 2016). Hal tersebut disebabkan karena adanya perlawanan pajak yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal wajib pajak tersebut. Sehingga teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan maksud dalam penelitian ini.

### **2.1.3 Teori Pemungutan Pajak**

Resmi (2014: 5) terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain:

#### **1. Teori Asuransi**

Dalam teori ini menjelaskan bahwa negara bertugas untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingannya diperlukan pembayaran premi. Sama halnya hubungan antara negara dan rakyatnya, pajak dianggap sebagai premi yang harus dibayarkan oleh masing-masing individu yang sudah berkewajiban untuk membayar pajak.

#### **2. Teori Kepentingan**

Teori ini menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban pajak ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang tersebut beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah

sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan oleh mereka.

### 3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu berupa perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh setiap orang yang menikmati perlindungan tersebut, yaitu dalam bentuk pajak. Teori menekankan pada asas keadilan, bahwa pajak harus sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Gaya pikul ini dilihat dari pengeluaran maupun pembelanjaan masing-masing orang.

### 4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini lebih menekankan pada sifat suatu negara sehingga muncullah hak mutlak untuk memungut pajak. Hal ini menganggap bahwa orang-orang tidaklah berdiri sendiri, jika tidak ada negara maka tidak terdapat orang-orang di dalamnya. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga setiap orang akan menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk membayar pajak.

### 5. Teori Asas Gaya Beli

Dalam teori ini lebih melihat pada dampaknya dan memandang dampak baik tersebut sebagai dasar keadilannya. Teori asas gaya beli menjelaskan bahwa suatu negara mengambil gaya beli dari masing-masing warganya dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara

hidup masyarakatnya dan untuk membawa ke arah tertentu. Sehingga dalam teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

#### **2.1.4 Pajak Daerah**

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan orang pribadi maupun badan ke pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat kontra prestasi secara langsung, yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah (Siahaan, 2010: 7). Pajak daerah diterapkan melalui peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dibagi menjadi dua dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga dalam pengelolaan pajaknya pun dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, dan air tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.



### **2.1.5 Pajak Hotel**

Pajak hotel merupakan salah sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di Kota Malang pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sifatnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan yang dimaksud antara lain fasilitas penginapan, pelayanan penunjang (fasilitas telepon, internet, *laundry*, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh hotel), fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara maupun pertemuan di hotel (Siahaan, 2010: 302). Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Sistem pemungutan yang digunakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang yaitu pengusaha hotel dapat menyetorkan pajaknya melalui pajak online yaitu *e-tax*. Dengan adanya sistem tersebut pengusaha hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang tidak perlu menghitung sendiri besaran pajak yang harus disetorkan, melainkan pajak yang disetorkan akan terhitung secara otomatis melalui sistem tersebut.

### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Secara umum menurut Marsyahrul (2005) sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan melalui tiga sistem yaitu

#### **a. *Self Assessment System***

Suatu sistem pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung sendiri pajak terutang, memperhitungkan

sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berhasil tidaknya penggunaan sistem ini tergantung pada wajib pajak sendiri dalam menguasai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

b. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada pada aparaturnya perpajakan. Berhasil tidaknya sistem ini tergantung pada aparaturnya perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *With holding system.*

Suatu sistem pemungutan pajak yang perhitungannya besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu ditunjuk dan diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan pajak. Berhasil tidaknya sistem ini tergantung pada pihak ketiga yang diberi kewenangan.

### **2.1.7 Kepatuhan Pajak**

Salah satu faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak ada pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmanto, 2005: 148). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka

semakin meningkat penerimaan pajaknya. Agar kepatuhan perpajakan ini berjalan dengan sempurna perlu adanya kerja sama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak (Zain, 2008: 9). Menurut Nurmantu (2005: 149) kepatuhan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana (Zain, 2008: 31):

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan jujur, benar, dan baik.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

#### **2.1.8 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Halim, Ranga Bawono, dan Dara (2014: 8) menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak dan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan sengaja. Selain itu Siahaan (2010: 110) menjelaskan bahwa

penggelapan pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat seperti bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Sedangkan menurut Sumarsan (2013: 9) penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan yang ilegal untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Walaupun pada dasarnya sama dengan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak jelas merupakan perbuatan ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak (Zain, 2008: 49). Adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berdampak besar pada kerugian negara. Halim, Rangga Bawono, dan Dara (2014: 8) menjelaskan bahwa terdapat dampak-dampak dari penggelapan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

a. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak dalam bidang keuangan merupakan kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti adanya kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

b. Dalam Bidang Ekonomi

1. Penggelapan pajak dapat mempengaruhi persaingan sehat antar pengusaha bisnis. Pengusaha bisnis akan berusaha untuk menekan biayanya secara tidak wajar sehingga menyebabkan perusahaan menggelakkan pajak untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dari perusahaan yang lain.
  2. Penggelapan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi. Jika wajib pajak terbiasa untuk melakukan penggelapan pajak, maka wajib pajak tidak akan meningkatkan produktivitasnya sehingga untuk memperoleh laba yang tinggi wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
  3. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha untuk menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui oleh fiskus. Sehingga wajib pajak tidak berani untuk menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal,
- c. Dalam Bidang Psikologi
- Wajib Pajak yang terbiasa melakukan penggelapan pajak berarti sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika perbuatan tersebut tidak diketahui oleh fiskus maka tidak ada sanksi maupun hukuman yang diterima oleh wajib pajak sehingga menimbulkan keinginan wajib pajak untuk mengulangi perbuatan tersebut yang melanggar undang-undang.

### **2.1.9 Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan**

Menurut Albrecht (2012:6) kecurangan (*fraud*) merupakan istilah umum dan mencakup berbagai cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan untuk dilakukan oleh satu individu, untuk menciptakan suatu keuntungan lebih dari pihak lain dengan

penyajian yang salah atau palsu. Tidak ada kepastian dan aturan yang tetap dapat ditetapkan sebagai proporsi umum dalam mendefinisikan penipuan, karena meliputi kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia. Terdapat tiga aspek dalam kecurangan, yaitu penipuan (*deception*), niat (*intent*), dan ketidakjujuran (*dishonest*). (Apriadi, 2015) kecurangan berkaitan dengan cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu.

Sedangkan menurut O’Gara, John D (2004:1) kecurangan meliputi sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Hal tersebut dapat dilakukan untuk sebuah keuntungan pribadi ataupun untuk merugikan organisasi baik dari pihak lain maupun di dalam organisasi.

Dari beberapa definisi kecurangan di atas dapat diartikan bahwa kecurangan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bermaksud untuk membohongi dan merekayasa kondisi sebenarnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik karyawan maupun manajer yang memiliki kedudukan tinggi di sebuah organisasi.

Menurut Ayu dan Hastuti (2009) menjelaskan bahwa persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang rutin dan ketat maka kemungkinan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan

kecurangan akan semakin sedikit dikarenakan wajib pajak akan patuh terhadap aturan yang berlaku. Wajib pajak merasa takut ketika perbuatannya diketahui oleh petugas pajak maka akan lebih besar uang yang dikeluarkan untuk membayar sanksi daripada pajak yang seharusnya dibayarkan.

Berbagai kasus kecurangan pajak telah terjadi di Indonesia seperti adanya sebesar 70 persen pengusaha hotel di Kota Malang menggelapkan pajak (Mon, Pelita: 18 Desember 2016). Hal tersebut sangat merugikan Pemerintah Kota Malang. Meskipun target dari penerimaan pajak hotel di Kota Malang sudah terlampaui, namun seharusnya penerimaan masih bisa dimaksimalkan lagi. Kecurangan tersebut berupa manipulasi pelaporan yang dilakukan oleh pengusaha hotel untuk menekan jumlah pajak serendah-rendahnya. Kasus kecurangan pajak yang terjadi telah memperlihatkan bagaimana sistem perpajakan Indonesia berlaku curang (Yusmarwandi, 2014).

#### **2.1.10 Kecenderungan Personal**

Menurut Ayu dan Hastuti (2009) kecenderungan melakukan penggelapan pajak merupakan aspek personal dari diri pribadi wajib pajak baik secara pasif maupun aktif. Tindakan atau sikap personal tersebut termasuk dalam tata kelola sistem perpajakan Indonesia yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan perlawanan terhadap pembayaran pajak. Pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara maka dituntut masyarakat untuk sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak (Sumarsan, 2013: 8). Pemerintah berusaha merancang strategi agar masyarakat taat dalam membayar pajak seperti adanya sosialisasi mengenai peraturan pajak dan fungsi

pajak untuk menghindari adanya perlawanan pajak yang muncul dari diri wajib pajak.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kecenderungan personal merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan dengan tidak membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Brotodiharjo (2003: 13) dalam Yusmarwandi (2014) menjelaskan bahwa perlawanan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sumarsan (2013: 8) menyebutkan bahwa perlawanan pajak dibedakan menjadi dua, yakni perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. *Pertama*, perlawanan secara pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Misalnya, sistem birokrasi yang rumit dan penghitungan pajak yang sulit bagi masyarakat. *Kedua*, perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Terdapat tiga cara perlawanan pajak aktif yaitu penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan melalaikan pajak.

#### **2.1.11 Teknologi Sistem Perpajakan**

Menurut Zain (2008: 22) bahwa tujuan dari sistem perpajakan yang terdiri dari kebijakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan adalah untuk menjamin agar tetap dapat dilaksanakannya dalam jangka panjang kebijakan fiskal dan program-program pemerintah yang sudah menjadi rencana pemerintah, sedang



tujuan utama administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sudah dipilih tersebut dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Untuk mencapai sasaran perpajakan, sistem perpajakan memiliki dua prinsip utama yaitu prinsip keadilan (*equity*) dan efisiensi ekonomik (*economic effeciency*). Modernisasi administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan dengan maksud agar lebih efesien, ekonomis, dan cepat (Candra, Wibisono, dan Mujilan, 2013). Menurut Pandiangan (2008: 7) salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan adalah adanya penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan. Teknologi dan informasi perpajakan merupakan proses pembaruan di bidang teknologi yang berkaitan sistem perpajakan seperti adanya *e-tax*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah menjelaskan bahwa Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak daerah melalui *online system* atau *e-tax*. *Online system* merupakan pelaporan data transaksi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang yang berwenang untuk menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dengan menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha. Alat atau sistem perekaman pada *online*

*system* akan merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang. Sehingga hal tersebut akan memudahkan Wajib Pajak yang tidak perlu menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Penggunaan *online system* diharapkan dapat memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghemat waktu, akurat, *paperless*, meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan sehingga meminimalisir adanya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Aryati, 2016). Sehingga dari beberapa penjelasan diatas dapat diartikan bahwa teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk adanya modernisasi perpajakan yang bertujuan untuk dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya serta dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

## **2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis Penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian ini:

Ayu dan Hastuti (2009) melakukan penelitian mengenai persepsi wajib pajak: dampak pertentangan diametral pada *tax evasion* wajib pajak. Penelitian tersebut menggali persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang mengenai *tax evasion* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif

antara kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian terhadap *tax evasion*. Sedangkan persepsi keadilan, penggunaan teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*.

Ayu (2011) melakukan penelitian mengenai persepsi efektifitas pemeriksaan pajak terhadap kecenderungan melakukan perlawanan pajak. Penelitian tersebut menggali persepsi efektifitas pemeriksaan pajak dalam menemukan kecurangan terhadap kecenderungan *tax evasion* wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Yusmarwandi (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh wajib pajak usahawan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Banda Aceh. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan kecenderungan personal terhadap penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan kecenderungan personal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Permatasari (2013) melakukan penelitian mengenai minimalisasi *tax evasion* melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Sari (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketetapan pengalokasian pajak, teknologi sistem perpajakan, dan *tax morale* terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*.

Yurika (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketetapan pengalokasian pajak, teknologi sistem perpajakan, dan *tax morale* terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax evasion*.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan
1.	Ayu dan Hastuti (2009)	Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada <i>Tax Evasion</i> Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)	Untuk menggali persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang mengenai <i>tax evasion</i> dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yakni kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal	Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengambilan data menggunakan <i>random sampling</i> . Analisis data menggunakan SPSS.	Terdapat pengaruh negatif antara kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan persepsi keadilan, penggunaan teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	Variabel independen yang digunakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek penelitian pada Pemerintah Kota Malang.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan Peneliti</b>	<b>Metodologi Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan</b>
2.	Ayu, Stephana Dyah (2011)	Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak	Untuk menggali persepsi efektifitas pemeriksaan pajak dalam menemukan kecurangan terhadap kecenderungan <i>tax evasion</i> wajib pajak.	Pengumpulan data menggunakan strategi opini dengan teknik pengumpulan data survei dan alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner, pengambilan data menggunakan <i>quota sampling</i> . Analisis data menggunakan SPSS	Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear sederhana menunjukan hasil bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .	Variabel independen yang digunakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal dan teknologi sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek penelitian pada Pemerintah Kota Malang.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan Peneliti</b>	<b>Metodologi Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan</b>
3.	Yusmarwandi (2014)	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Banda Aceh)	Untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan kecenderungan personal terhadap penggelapan pajak baik secara parsial maupun simultan.	Pengumpulan data menggunakan kuesioner, Analisis data menggunakan analisis statistik regresi linear berganda (SPSS).	Hasil analisis regresi diketahui bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, dan kecenderungan personal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggelapan pajak.	Variabel independen yang digunakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan kecenderungan personal. Terdapat penambahan variabel independen yaitu teknologi sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek penelitian pada Pemerintah Kota Malang.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan
4.	Permatasari (2013)	Minimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)	Untuk menjelaskan dan menganalisis persepsi dari tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap minimalisasi <i>tax evasion</i> .	Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan <i>incidental sampling</i> . Analisis data menggunakan SPSS	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	Variabel independen yang digunakan teknologi sistem perpajakan. Terdapat penambahan variabel independen yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan kecenderungan personal. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek penelitian pada Pemerintah Kota Malang.



**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan
5.	Sari (2015)	Pengaruh Keadilan, <i>Self Assessment System</i> , Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Untuk mengetahui pengaruh keadilan, <i>self assessment system</i> , diskriminasi, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM) dengan <i>Partial Least Square</i> (PLS) <i>Path Modelling</i> dengan alat analisis <i>SmartPLS2.0 M3</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan, <i>self assessment system</i> , dan kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Variabel diskriminasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Untuk variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	Variabel independen yang digunakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Terdapat penambahan variabel independen yaitu kecenderungan personal dan teknologi sistem perpajakan. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek oenelitian pada Pemerintah Kota Malang.

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Tedahulu**

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Peneliti	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan
6.	Yurika (2016)	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i>	Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketetapan pengalokasian pajak, teknologi sistem perpajakan, dan <i>tax morale</i> terhadap <i>tax evasion</i> .	Pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengambilan data menggunakan <i>convenience sampling</i> . Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda (SPSS).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan <i>tax morale</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan ketepatan pengalokasian pajak dan teknologi sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .	Variabel independen yang digunakan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan teknologi sistem perpajakan. Terdapat penambahan variabel independen yaitu kecenderungan personal. Variabel dependen yang digunakan adalah <i>tax evasion</i> pemungutan pajak hotel. Objek penelitian pada Pemerintah Kota Malang.

### **2.2.2 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang**

Kecurangan dapat terdeteksi dengan adanya pemeriksaan pajak rutin yang dilakukan oleh petugas pajak. Ayu (2011) menjelaskan bahwa persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Salah satu upaya dari pemerintah untuk menangani kecurangan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak karena pada sekarang ini banyak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Ulfa, 2015). Kondisi serupa terjadi di Kota Malang yaitu adanya kecurangan dalam memanipulasi pelaporan yang dilakukan oleh pengusaha hotel yang menyetorkan pajaknya tidak sesuai dengan jumlah kamar yang disewakan, melainkan hanya target dari setiap periodenya yang dilaporkan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang (Mon, Pelita: 18 Desember 2016).

Mengacu pada model TPB dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara tidak langsung ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi Wajib Pajak Hotel dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Kecurangan merupakan salah satu faktor adanya tindakan penggelapan pajak seperti memanipulasi pendapatan atau tidak melaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan karena adanya suatu keinginan atau niat untuk melakukan tindakan kecurangan. Norma subjektif dibentuk oleh *normative*

*belief* yang berupa pandangan seseorang terhadap keyakinan orang lain atau adanya tekanan sosial yang akan mempengaruhinya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut (Jogiyanto, 2008). Pandangan seseorang yang dimaksud seperti pemilik hotel, Wajib Pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar dari Wajib Pajak Hotel. Dengan adanya tekanan dari pihak tertentu tersebut membuat Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan pajak hotel yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya atau justru patuh sesuai aturan terhadap kewajiban pajaknya karena merasa takut dengan petugas pajak dan sanksi yang akan dikenakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wanarta (2014) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan penggelapan pajak. Wajib Pajak akan memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak jika Wajib Pajak merasa bahwa orang yang dianggap penting dan lingkungan sekitar berpikir dia harus melakukan kecurangan dan memotivasinya untuk menggelapan pajak. Selain itu, *control belief* akan mempengaruhi kontrol perilaku yang dipersepsikan, yaitu keyakinan individu mengenai hal-hal yang menghambat atau mendukung perilakunya (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku persepsian ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk meminimalisir adanya kemungkinan terjadinya kecurangan pada pemungutan pajak hotel.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan hasil bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Rahman (2013) dan

Yurika (2016) bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Yurika (2016) menjelaskan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak maka *tax evasion* akan semakin rendah. Artinya, ketika wajib pajak menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka wajib pajak akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketika kemungkinan terdeteksinya kecurangan tinggi maka *tax evasion* akan rendah karena wajib pajak cenderung patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak merasa takut untuk melakukan kecurangan pajak dikarenakan jika diketahui oleh petugas pajak maka dana yang dikeluarkan untuk membayar sanksinya akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti ingin menguji kembali kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka dapat dirumuskan hipotesis *pertama* sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** = Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

### **2.2.3 Pengaruh Kecenderungan Personal Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang**

Kecenderungan personal merupakan aspek pribadi wajib pajak berupa sikap maupun tindakan secara aktif maupun pasif dalam melakukan perlawanan pajak. Sikap dibentuk dari adanya *behavior belief*, yaitu keyakinan individu akan hasil dan evaluasi suatu perilaku (Ajzen, 1991). Ketika tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak Hotel atau timbal balik yang diterima dari pemerintah, Wajib Pajak Hotel akan cenderung merespon negatif dengan melakukan perlawanan pajak kepada pemerintah. Perlawanan pajak terjadi dikarenakan adanya kesulitan pada sistem birokrasi, menyembunyikan aset supaya jumlah pajak yang dibayarkan rendah, kurang memahami perhitungan pajak, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh petugas pajak sehingga menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Tindakan perlawanan pajak tersebutlah yang dapat mempengaruhi sikap seseorang untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menggelapkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki sikap positif untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka niat untuk melakukan penggelapan pajaknya semakin tinggi (Wanarta, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) menunjukkan hasil bahwa kecenderungan personal berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, bahwa sikap atau tindakan aspek dari diri pribadi untuk melakukan perlawanan pajak akan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menunjukkan hasil bahwa kecenderungan personal tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap tingkat *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan tidak semua perilaku wajib pajak dalam melakukan *tax evasion* dipengaruhi oleh kecenderungan personal karena pada wajib pajak meskipun faktor internal keinginan untuk melakukan *tax evasion* tinggi akan tetapi faktor eksternal ketakutan untuk diperiksa oleh fiskus lebih dominan. Dampak melakukan penggelapan pajak dirasa lebih menakutkan oleh wajib pajak karena jika terbukti melakukan kecurangan maka sanksi ataupun denda yang diberikan akan jauh lebih besar. Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis *kedua* sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** = Kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

#### **2.2.4 Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel Di Kota Malang**

Modernisasi administrasi perpajakan yang saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah adalah penyempurnaan dari pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan yang sudah ada (Pandiangnan, 2007). Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk adanya modernisasi perpajakan yang bertujuan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Pemanfaatan teknologi sistem perpajakan ini digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan transaksi usaha yang merupakan obyek pajak daerah melalui *online system* atau yang dikenal dengan *e-tax*. Dengan adanya *online system* atau *e-tax* akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak Hotel dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara efektif dan efisien. Ketika Wajib Pajak semakin dipermudah dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan Wajib Pajak dapat

memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Silaen, 2015).

Dalam TPB pemanfaatan teknologi sistem perpajakan ini dapat dikaitkan dengan adanya kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dibentuk oleh adanya *control belief*. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi (Wanarta, 2014). Dalam hal ini teknologi sistem perpajakan akan mudah digunakan bagi yang mengerti kemajuan teknologi di era sekarang. Namun akan menyulitkan jika individu tersebut tidak mengerti teknologi. Sehingga masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan adanya teknologi sistem perpajakan dengan maksimal. Wajib Pajak akan cenderung melaporkan dan menyetorkan secara manual karena dirasa adanya teknologi sistem perpajakan justru menyulitkan.

Dalam penelitian Ayu dan Hastuti (2009) dan Yurika (2016) teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran secara manual dan jarang membuka website yang disediakan oleh pemerintah sehingga teknologi sistem perpajakan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku *tax evasion* Wajib Pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Permatasari (2013) yang menunjukkan hasil jika teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal tersebut berarti bahwa kesadaran wajib Pajak terhadap penggunaan teknologi dan informasi perpajakan



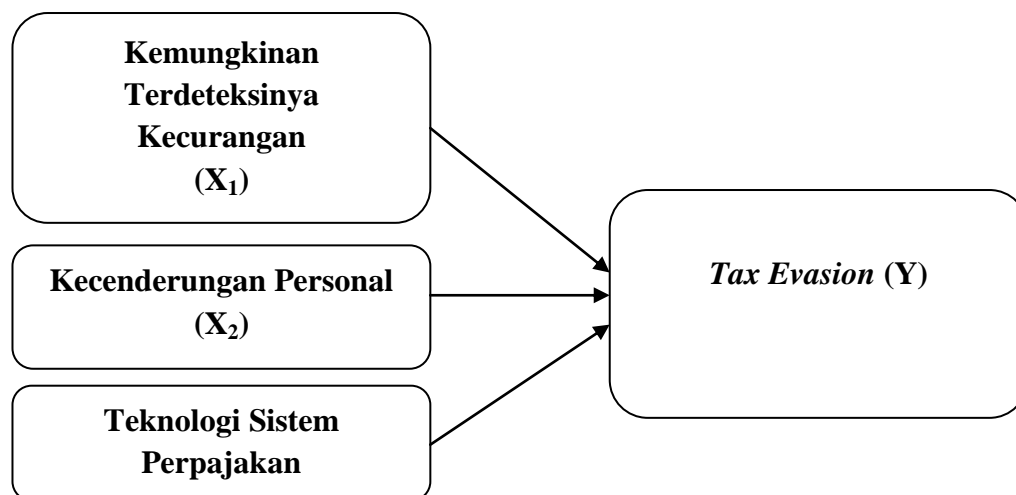
masih rendah karena banyak Wajib Pajak yang masih menggunakan sistem pembayaran manual. Semakin rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan dapat memicu semakin tingginya *tax evasion* di masyarakat. Sehingga dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis *ketiga* sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** = Teknologi Sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan tiga variabel antara lain kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan. Berikut ini merupakan gambar kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reasearch*) atau survei. Menurut Sugiyono (2012: 6) metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian yaitu hotel di Kota Malang dan menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner ini berisi tentang persepsi wajib pajak hotel di Kota Malang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya *tax evasion* pada Wajib Pajak Hotel di Kota Malang. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada usulan Roscoe (1975) dalam Sekaran dan Bougie (2013: 269) yang menyebutkan bahwa ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian dan untuk penelitian *multivariate* seperti korelasi atau analisis regresi berganda, ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Nugroho, 2007: 126).

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia tepatnya di Kota Malang pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati variabel-variabel yang menjadi pengaruh terjadinya *tax evasion* pada Wajib Pajak Hotel di Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data primer.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran dan Bougie (2013: 240) populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu lainnya yang menarik peneliti untuk dilakukan investigasi. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel di Kota Malang yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Populasi pada penelitian ini berjumlah 104 hotel berbintang maupun non bintang yang tersebar di lima kecamatan di Kota Malang (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016).

Sampel merupakan bagian dari populasi. Menurut Sugiyono (2012: 81) bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut disebut sebagai sampel. Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2013: 269) menjelaskan bahwa ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian dan untuk penelitian *multivariate* seperti korelasi atau analisis regresi berganda, ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.

Berdasarkan pendapat tersebut maka peneliti mengambil sampel sebesar 83 hotel baik hotel berbintang dan non bintang yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang

diberikan oleh peneliti dan diambil kembali kuesioner tersebut. Peneliti menggunakan jumlah sampel tersebut untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian dan menghindari kuesioner yang tidak dapat diolah. Selain itu penentuan jumlah tersebut juga sesuai dengan perhitungan pada rumus slovin (Umar, 2003: 141) dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Berikut merupakan perhitungan untuk menentukan ukuran sampel dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{104}{1 + 104(0,05^2)}$$

$$n = 82,53$$

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel nonprobabilitas dengan jenis *purposive sampling* tipe *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang menurut peneliti bahwa subyek tersebut adalah pilihan yang tepat untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran dan Bougie, 2013: 252). Teknik pengambilan sampel tersebut sesuai dengan kriteria sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu bagian akuntansi dan keuangan hotel di Kota Malang yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan bagian akuntansi dan keuangan hotel dikarenakan bagian tersebut lebih mengetahui dan memahami mengenai perpajakan dan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

### **3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

#### **3.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel bebas atau Variabel Independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya pada variabel terikat atau

variabel dependen (Y). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengaruh terjadinya *tax evasion* pada pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu:

### **1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan**

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dilihat dari adanya pemeriksaan rutin dan ketat yang dilakukan oleh petugas pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan merasa takut dengan adanya pemeriksaan pajak dikarenakan jika kecurangan yang dilakukan diketahui oleh petugas pajak, maka akan menimbulkan sanksi denda yang lebih tinggi daripada jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Jika pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara efektif akan berdampak kepada perilaku Wajib Pajak yang cenderung patuh dan tidak melakukan kecurangan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Variabel ini termasuk dalam daftar (konstruk) pertanyaan yang ada pada kuesioner dan diukur menggunakan skala interval. Skala Interval memungkinkan peneliti untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang diperoleh dari responden (Sekaran, 2013:214). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti. Respon dari responden diukur dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dimana 1 (satu) sangat tidak setuju hingga 5 (lima) sangat setuju. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

## **2. Kecenderungan personal**

Kecenderungan personal merupakan tindakan perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tidak membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Purwono (2010: 16) menyebutkan bahwa perlawanan pajak dibedakan menjadi dua, yakni perlawanan secara pasif dan perlawanan secara aktif. Perlawanan pasif lebih mengarah pada struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta teknik pemungutan pajak. Sedangkan untuk perlawanan aktif lebih mengarah pada penghindaran diri dari pajak, pengelakkan diri dari pajak dan melalaikan pajak. Variabel ini termasuk dalam daftar (konstruk) pertanyaan yang ada pada kuesioner dan diukur menggunakan skala interval. Skala Interval memungkinkan peneliti untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang diperoleh dari responden (Sekaran, 2013:214). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti. Respon dari responden diukur dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dimana 1 (satu) sangat tidak setuju hingga 5 (lima) sangat setuju. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

## **3. Teknologi Sistem Perpajakan**

Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Adanya teknologi sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah membuat Wajib Pajak dituntut untuk dapat memahami

dan mengerti penggunaan teknologi sistem perpajakan. Konsep dan tujuan adanya modernisasi perpajakan di bidang teknologi ini berkaitan dengan adanya perubahan dari sistem dan proses kerja yang manual menjadi sistem yang berbasis teknologi (Pandiangan, 2008: 9). Variabel ini termasuk dalam daftar (konstruk) pertanyaan yang ada pada kuesioner dan diukur menggunakan skala interval. Skala Interval memungkinkan peneliti untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang diperoleh dari responden (Sekaran, 2013:214). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti. Respon dari responden diukur dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dimana 1 (satu) sangat tidak setuju hingga 5 (lima) sangat setuju. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

### **3.4.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen (X). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengaruh terjadinya *tax evasion* pada pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

#### **1. *Tax Evasion***

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu perbuatan yang ilegal yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Wajib Pajak, seperti sengaja untuk tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWPD

ataupun tidak melaksanakan proses pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Variabel ini termasuk dalam daftar (konstruk) pertanyaan yang ada pada kuesioner dan diukur menggunakan skala interval. Skala Interval memungkinkan peneliti untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang diperoleh dari responden (Sekaran, 2013:214). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner yang disediakan oleh peneliti. Respon dari responden diukur dengan menggunakan skala likert 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dimana 1 (satu) sangat tidak setuju hingga 5 (lima) sangat setuju. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

Berikut ini merupakan penjelasan secara lengkap mengenai definis operasional variabel penelitian, yaitu

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>No. Soal Pada Kuesioner</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X <sub>1</sub> ) (Sumber : Ayu dan Hastuti (2009), Yurika (2016))	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WP memenuhi kewajiban pajaknya atas dasar karena takut terhadap hukum perpajakan yang berlaku.</li> <li>2. WP mengisi SPTPD dengan benar untuk menghindari sanksi denda.</li> <li>3. Adanya tindakan pemeriksaan.</li> </ol>	Interval	1 – 5	<i>Likert</i>



**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>No. Soal Pada Kuesioner</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) (Sumber : Brotodiharjo (2003) dalam Yusmarwandi (2014))	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlawanan pasif meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teknik pemungutan pajak.</li> <li>b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk.</li> </ol> </li> <li>2. Perlawanan aktif meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindarkan diri dari pajak.</li> <li>b. Mengelakkan diri dari pajak.</li> <li>c. Menyembunyikan jumlah kamar yang terjual agar jumlah pajak terutang menjadi kecil.</li> </ol> </li> </ol>	Interval	6 – 12	<i>Likert</i>
Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) (Sumber : Ayu dan Hastuti (2009), Yurika (2016))	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.</li> <li>2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak.</li> <li>3. Akses informasi perpajakan yang mudah.</li> <li>4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.</li> <li>5. Pelaporan dan penyetoran pajak hotel menggunakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.</li> </ol>	Interval	13-19	<i>Likert</i>

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>No. Soal Pada Kuesioner</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) ( $X_3$ ) (Sumber : Yurika (2016))	1. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWPD. 2. Tidak menyampaikan SPTPD. 3. Menyampaikan SPTPD dengan tidak benar. 4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. 5. Berusaha menyuap petugas pajak.	Interval	20 - 29	<i>Likert</i>

### 3.5 Data Penelitian

#### 3.5.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pimer dan data sekunder. Data primer merupakan merupakan data yang didapat secara langsung dari responden tanpa adanya perantara atau pihak ketiga dengan cara mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh peneliti.

##### 1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2012: 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Secara garis besar terdapat dua cara penggunaan kuesioner yaitu *pertama*, dengan cara disebarkan kepada responden dan *kedua*, digunakan sebagai pedoman wawancara dengan responden (Sekaran dan Bougie, 2013: 147). Data primer yang digunakan adalah hasil dari kuesioner

yang dibagikan kepada responden, yaitu bagian akuntansi dan keuangan hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Malang.

## 2. Wawancara

Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Malang dan tahap eksplorasi fenomena, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, yaitu Ibu Wiwik selaku karyawan bagian Pendaataan dan Pelayanan Wajib Pajak. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah Wajib Pajak Hotel yang terdaftar dan mengenai tindakan *tax evasion* pajak hotel di Kota Malang. Pada wawancara tidak terstruktur, pewawancara tidak melakukan wawancara dengan susunan pertanyaan yang telah direncanakan untuk diajukan kepada responden (Sekaran dan Bougie, 2013: 118).

Sedangkan data sekunder mengacu pada data-data yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2013: 113). Data sekunder digunakan untuk landasan teori dan pendukung analisis data primer dalam penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai literatur, antara lain:

1. Buku terkait perpajakan di Indonesia, metodologi penelitian untuk bisnis, *Theory of Planned Behavior* (TPB), pembahasan terkait metode statistik SPSS, dan jurnal ilmiah yang terpublikasi terkait pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.
2. Publikasi di website Pemerintah Daerah Kota Malang, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, dan Badan Pusat Statistik Kota Malang.

### 3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) atau survei. Survei dilakukan secara langsung dengan melakukan peninjauan ke objek penelitian, yaitu hotel bintang maupun non bintang yang ada di Kota Malang dan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah karyawan bagian akuntansi dan keuangan hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel yang ada di Kota Malang.

Peneliti menggunakan kuesioner dengan cara menggabungkan kuesioner-kuesioner peneliti terdahulu yang paling sesuai untuk digunakan pada penelitian ini. Kuesioner pada penelitian ini dikembangkan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Yusmarwandi (2014), dan Yurika (2016). Peneliti menggunakan kuesioner dari beberapa peneliti terdahulu karena variabel yang digunakan sama, yaitu *tax evasion*, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan terhadap pernyataan-pernyataan pada kuesioner agar dapat digunakan untuk melakukan penelitian mengenai *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Adapun tahapan penyusunan kuesioner adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memperoleh kuesioner melalui jurnal yang dipublikasikan oleh universitas terkait dan menghubungi via email untuk meminta data secara langsung dari peneliti-peneliti terdahulu, yaitu Ayu dan Hastuti (2009), Yusmarwandi (2014), dan Yurika (2016).

2. Peneliti mencari dan memilih pernyataan yang sesuai dengan penelitian ini dari kuesioner Ayu dan Hastuti (2009), Yusmarwandi (2014), dan Yurika (2016).
3. Peneliti melakukan penyesuaian pernyataan-pernyataan yang ada pada kuesioner agar sesuai dengan penelitian ini yaitu mengenai *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Penyesuaian kuesioner dapat dilihat pada lampiran 1.
4. Peneliti memperbaiki seluruh indikator kuesioner jika terdapat salah ejaan atau bahasa dan menyusunnya kembali agar menjadi satu kesatuan kuesioner.
5. Peneliti menambahkan beberapa pernyataan pada indikator teknologi sistem perpajakan dan *tax evasion* yang berkaitan dengan penyetoran pajak. Berikut merupakan tambahan pernyataan pada kuesioner penelitian:

**Tabel 3.2**  
**Tambahan pernyataan kuesioner**

<b>Indikator</b>	<b>Nomor Pertanyaan</b>	<b>Dasar</b>	<b>Pernyataan yang Ditambahkan</b>
Teknologi Sistem Perpajakan	17	Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 pasal 67 B ayat 1.	Saya melaporkan data transaksi usaha melalui <i>e-tax</i> .
	18	Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 pasal 47 ayat 1.	Saya menyetorkan pajak dengan <i>e-tax</i> melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

6. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert 5 poin, dengan rincian adalah (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 93).

Selanjutnya, peneliti melakukan *pilot test* kepada 50 orang. Ukuran sampel mengacu pada pendapat Roscoe dalam (Sekaran dan Bougie, 2013: 269) menjelaskan bahwa ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Kuesioner dibagikan secara langsung oleh peneliti pada pelatihan brevet salah satu lembaga di Kota Malang pada tanggal 22 Februari 2017.

Peneliti melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada data yang diperoleh untuk menguji dan mengetahui bahwa kuesioner sudah benar dan dapat dipahami makna dari setiap item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti agar terhindar dari adanya bias dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Pada pengujian ini semua data dinyatakan valid dan kuesioner siap untuk disebar. Hasil data dapat dilihat pada lampiran 3.

Setelah itu, peneliti melakukan penyebaran kuesioner langsung kepada sampel penelitian yaitu bagian akuntansi dan keuangan hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Malang. Berikut merupakan tahapan penyebaran kuesioner:

1. Peneliti mengumpulkan data mengenai lokasi Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Malang.
2. Peneliti mengumpulkan tim untuk membantu peneliti menyebarkan kuesioner ke semua hotel yang ada di Kota Malang.
3. Peneliti dan tim mendatangi hotel dan melakukan konfirmasi kesediaan dari pihak hotel untuk menerima kuesioner penelitian dengan cara menelpon hotel dan datang secara langsung.

4. Selanjutnya, jika pihak hotel bersedia untuk menerima kuesioner penelitian, maka kuesioner tersebut akan disampaikan melalui HRD ke bagian akuntansi dan keuangan hotel.
5. Peneliti dan tim memberitahukan kepada pihak hotel mengenai batasan waktu penyelesaian dan pengumpulan kembali kuesioner yaitu dua hari. Hal tersebut untuk meminimalisir keterlambatan dan tidak kembalinya kuesioner penelitian.
6. Setelah dua hingga tiga hari penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dan tim, peneliti mengumpulkan seluruh data kuesioner dan melakukan rekap awal terhadap hasil kuesioner.
7. Peneliti menentukan jumlah minimal kuesioner yang diharapkan kembali, yaitu 67 kuesioner. Apabila jumlah minimal tersebut terpenuhi maka peneliti dapat melakukan proses selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Sedangkan, jika jumlah minimal tersebut belum terpenuhi maka peneliti akan melanjutkan konfirmasi kuesioner yang belum kembali dan penyebaran ulang kuesioner selama dua hingga tiga hari yang akan datang.

### **3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Validitas**

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan dari masing-masing daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut Sugiyono (2012: 267) menjelaskan bahwa validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Pengujian ini dapat dikatakan memiliki validitas tinggi ketika instrument dapat menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan pengukuran yang dimaksud.

Sedangkan ketika pengujian validitas rendah maka data yang dihasilkan tidak relevan dengan pengukuran yang dimaksud.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation*, dimana akan dihitung korelasi dari setiap konstruk pertanyaan untuk semua variabel. Konstruk dikatakan valid jika nilai  $r$  hitung  $\geq$  nilai  $r$  tabel dan signifikansi  $< 0,05$ .

### **3.6.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan pada kuesioner sudah konsisten atau belum. Pengujian ini untuk mengetahui alat ukur yang digunakan dapat dipercaya dan diandalkan. Ketika jawaban kuesioner relatif konsisten maka dapat dikatakan *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas akan menunjukkan konsistensi kuesioner dengan tujuan penelitian yang diambil. Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Menurut Apriadi (2015) kriteria dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* adalah jika  $\alpha > 0,6$ , maka instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel.

## **3.7 Metode Analisis Data**

### **3.7.1 Uji Asumsi Klasik**

Setelah data dideskripsikan dan dilakukan pengolahan kualitas data maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi beberapa pengujian sebagai berikut:

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik, ketika nilai residualnya normal. Uji normalitas ini bukan dilakukan pada masing-masing



variabelnya, namun pada nilai residualnya. Alat yang digunakan dalam pengujian ini adalah grafik normal plot dan *Kolmogorov Smirnov*. Pada grafik normal plot, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, pengujian dengan *Kolmogorov Smirnov* akan menunjukkan bahwa model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal dan nilai signifikansi  $> 0,05$  (Ghozali, 2013: 156).

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolenieritas adalah keadaan dimana terjadi korelasi linear yang sempurna (*perfect*) diantara variabel penjelas yang ada dalam model. Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tidak adanya hubungan atau keterkaitan antar variabel bebas (Ghozali, 2013: 103). Multikolenieritas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka hasil pengujian bebas dari masalah multikolenieritas.

## 3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas muncul apabila terdapat kesalahan (e) atau residual dari model yang dimiliki tidak terdapat varians yang konstan dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 134). Variabel pengganggu (*error*) atau e, dapat diasumsikan memiliki variabel konstan (memiliki rentang yang sama). Apabila variabel e tidak konstan maka kondisi tersebut dapat dikatakan mengalami heterokedastisitas. Pengujian dengan menggunakan grafik *scatter plot* untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik tersebut.

### 3.7.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Menurut Nugroho (2007: 126) regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan. Sedangkan variabel dependen adalah *tax evasion*. Analisis ini digunakan untuk menguji tiga hipotesis yang sudah dijelaskan. Berikut merupakan rumus regresi linear berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen *tax evasion*

a = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi dari variabel independen kemungkinan terdeteksinya kecurangan

$b_2$  = Koefisien regresi dari variabel independen kecenderungan personal

$b_3$  = Koefisien regresi dari variabel independen teknologi sistem perpajakan

$X_1$  = Variabel independen kemungkinan terdeteksinya kecurangan

$X_2$  = Variabel independen kecenderungan personal

$X_3$  = Variabel independen teknologi sistem perpajakan

e = error

Terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan pada tahap ini yaitu:

### 1. Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Jika nilai koefisien determinasi sama dengan nol ( $R^2 = 0$ ) berarti variasi dari variabel dependen (Y) tidak dapat diterangkan oleh variabel independen (X). Sedangkan, jika nilai koefisien determinasi sama dengan satu ( $R^2 = 1$ ) berarti variasi dari variabel dependen (Y) secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen (X). Menurut Ghazali (2013: 95) menjelaskan bahwa  $R^2$  yang mendekati satu, artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

### 2. Uji Statistik F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah ( $\alpha = 0,05$ ). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $f_{hitung}$  dan  $f_{tabel}$  pada variabel independen dengan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Ghazali (2013: 96) jika:

Nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$ , maka variabel independen berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

Nilai  $f_{hitung} < f_{tabel}$ , maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

### 3. Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang digunakan untuk mengetahui terdapat pengaruh atau tidak pada masing-masing variabel independen secara individual yang diuji dengan tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Seperti halnya dengan uji F dalam pengujian uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  pada variabel independen dengan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Ghozali (2013: 97) jika:

Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel independen berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Februari – 17 Maret 2017. Responden dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi dan keuangan hotel di Kota Malang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hotel pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Peneliti memilih responden tersebut dengan pertimbangan bahwa bagian akuntansi dan keuangan hotel lebih mengetahui dan memahami mengenai perpajakan dan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penyebaran Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	83	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	13	16%
3	Kuesioner yang tidak dapat diolah	3	4%
4	Kuesioner yang dapat diolah	67	80%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari 83 kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Hotel, terdapat 13 kuesioner yang tidak kembali, karena seluruh kuesioner yang masuk ke hotel harus melalui beberapa tahap persetujuan. Peneliti mendatangi langsung hotel-hotel yang ada di Kota Malang untuk meminta konfirmasi persetujuan pengisian kuesioner kepada pihak hotel. Kuesioner akan diterima oleh bagian *Human Resource Departement* (HRD) atau bagian resepsionis untuk disampaikan ke manajer hotel. Kuesioner yang diterima akan dikonfirmasi oleh peneliti melalui telepon ataupun datang secara langsung. Jika pihak hotel tidak dapat mengisi kuesioner, maka peneliti akan dikonfirmasi melalui telepon. Dalam penelitian ini terdapat 70 kuesioner yang kembali kepada peneliti dan

sebanyak 67 kuesioner yang dapat diolah, sedangkan 3 kuesioner tidak dapat diolah dikarenakan tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban kuesioner responden terhadap pernyataan positif dalam kuesioner yang dibuat oleh peneliti. Selain itu juga terdapat kuesioner yang jawabannya tidak ditanggapi oleh responden. Adanya pertanyaan positif yang dibuat oleh peneliti digunakan untuk kontrol dalam penelitian untuk mengetahui jawaban dari responden yang menjawab dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dengan demikian diketahui bahwa tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 84%, sedangkan tingkat kuesioner yang dapat diolah adalah sebesar 80% dari jumlah kuesioner yang disebar. Sivo *et al* (2006) memaparkan bahwa standar tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 70% hingga 80%. Babbie (1990) dalam Sivo *et al* (2006) berpendapat bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 60% adalah baik dan sebesar 70% adalah sangat baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini tingkat pengembalian yang dapat digunakan sebesar 80% adalah sangat baik.

Peneliti menyebarkan kuesioner ini pada Wajib Pajak Hotel yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Dalam pengisian kuesioner diketahui identitas dari responden yang diteliti sebagai dasar pembahasan dari penelitian ini. Identitas responden ini antara lain: jenis hotel, kepemilikan NPWPD, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

#### **4.1.1 Jenis Hotel**

Dari hasil data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, diketahui bahwa identitas dari responden, yaitu jenis hotel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Kategori Responden Berdasarkan Jenis Hotel**

No.	Jenis Hotel	Jumlah	Persentase (%)
1	Hotel Berbintang	15	22%
2	Hotel Non Bintang	52	78%
Total		67	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kategori jenis hotel yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 hotel berbintang atau 22% dari total jumlah responden hotel berbintang, dan 52 hotel non bintang atau 78% dari total jumlah responden hotel non-bintang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini didominasi hotel non bintang sebesar 78% dari total jumlah responden hotel berbintang dan non-bintang dikarenakan jumlah hotel berbintang di Kota Malang lebih kecil daripada hotel non-bintang.

#### **4.1.2 Kepemilikan NPWPD**

Dari hasil data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, diketahui bahwa identitas dari responden, yaitu kepemilikan NPWPD sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Kategori Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWPD**

No.	Kepemilikan NPWPD	Jumlah	Persentase (%)
1	Punya	67	100%
2	Tidak Punya	-	0%
Total		67	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa seluruh responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 100% telah memiliki NPWPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang ada dalam penelitian ini telah terdaftar pada Badan

Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

#### 4.1.3 Jenis Kelamin

Dari hasil data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, diketahui bahwa identitas dari responden, yaitu jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	30	45%
2	Perempuan	37	55%
Total		67	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kategori jenis kelamin yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebesar 30 orang atau 45% dari total jumlah responden berjenis kelamin laki laki, dan sebesar 37 orang atau 55% dari total jumlah responden berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini responden terbesar adalah berjenis kelamin perempuan.

#### 4.1.4 Usia

Dari hasil data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, diketahui bahwa identitas dari responden, yaitu usia sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Kategori Responden Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah	Persentase(%)
1	20 – 30 Tahun	10	15%
2	31 – 40 Tahun	34	51%
3	41 – 50 Tahun	22	33%
4	> 50 Tahun	1	1%
Total		67	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.



Dari data di atas, menunjukkan bahwa kategori usia yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebesar 67 orang responden, yang terdiri dari 10 orang yang berusia 20 – 30 tahun dengan presentase 15%. Selanjutnya, 34 orang atau 51% dari total jumlah responden yang berusia 31 – 40 tahun, 22 orang atau 33% dari total jumlah responden yang berusia 41 – 50 tahun, dan 1 orang sisanya atau 1% dari total jumlah responden yang berusia > 50 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia 31 – 40 tahun mendominasi dalam penelitian ini dan termasuk dalam usia produktif dalam menekuni pekerjaan sebagai akuntansi dan keuangan di hotel dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya.

#### 4.1.5 Pekerjaan

Dari hasil data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, diketahui bahwa identitas dari responden, yaitu pekerjaan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Kategori Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Akuntansi dan Keuangan Hotel	58	87%
2	Manajer Keuangan	9	13%
		67	100%

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kategori pekerjaan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebesar 58 orang atau 87% dari total jumlah responden akuntansi dan keuangan dan sisanya 9 orang atau 13% dari total jumlah responden manajer keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan akuntansi dan keuangan hotel mendominasi dalam penelitian ini dikarenakan bagian tersebut lebih mengetahui dan memahami mengenai perpajakan dan sistem pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

## 4.2 Uji Kualitas Data

### 4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Pearson Corelation* pada software SPSS 19 untuk menghitung korelasi antar masing-masing skor dari setiap butir pertanyaan di semua variabel. Pedoman yang digunakan untuk dikatakan valid adalah dengan membandingkan nilai yang didapat dari  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel, jika nilai dari  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2013: 53). Nilai  $r$  tabel didapatkan dari  $df = n-2$ , atau  $df = 67-2 = 65$ , dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga didapatkan nilai  $r$  tabel adalah 0.244. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dan *tax evasion* ( $Y$ ) dengan 67 responden.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ )**

Item	Nilai $r$ Hitung	Sig.	Nilai $r$ Tabel	Keterangan
X1.1	0.858	0.000	0.244	Valid
X1.2	0.619	0.000	0.244	Valid
X1.3	0.681	0.000	0.244	Valid
X1.4	0.710	0.000	0.244	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ). Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan terdiri dari 4 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid dengan menggunakan 67 responden, karena nilai  $r$  hitung  $\geq$  nilai  $r$  tabel.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Kecenderungan Personal (X<sub>2</sub>)**

<b>Item</b>	<b>Nilai r Hitung</b>	<b>Sig.</b>	<b>Nilai r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X2.1	0.633	0.000	0.244	Valid
X2.2	0.619	0.000	0.244	Valid
X2.3	0.495	0.000	0.244	Valid
X2.4	0.585	0.000	0.244	Valid
X2.5	0.536	0.000	0.244	Valid
X2.6	0.707	0.000	0.244	Valid
X2.7	0.404	0.001	0.244	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel kecenderungan personal (X<sub>2</sub>). Variabel kecenderungan personal terdiri dari 7 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid dengan menggunakan 67 responden, karena nilai r hitung  $\geq$  nilai r tabel.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Teknologi Sistem Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

<b>Item</b>	<b>Nilai r Hitung</b>	<b>Sig.</b>	<b>Nilai r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
X3.1	0.318	0.009	0.244	Valid
X3.2	0.819	0.000	0.244	Valid
X3.3	0.923	0.000	0.244	Valid
X3.4	0.901	0.000	0.244	Valid
X3.5	0.878	0.000	0.244	Valid
X3.6	0.261	0.033	0.244	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel teknologi sistem perpajakan (X<sub>3</sub>). Variabel teknologi sistem perpajakan terdiri dari 6 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid dengan menggunakan 67 responden, karena nilai r hitung  $\geq$  nilai r tabel.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Validitas *Tax Evasion* (Y)**

Item	Nilai r Hitung	Sig.	Nilai r Tabel	Keterangan
Y1	0.545	0.000	0.244	Valid
Y2	0.654	0.000	0.244	Valid
Y3	0.701	0.000	0.244	Valid
Y4	0.350	0.001	0.244	Valid
Y5	0.426	0.002	0.244	Valid
Y7	0.534	0.000	0.244	Valid
Y8	0.593	0.000	0.244	Valid
Y9	0.449	0.000	0.244	Valid
Y10	0.571	0.000	0.244	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas untuk variabel *tax evasion* (Y). Variabel *tax evasion* terdiri dari 9 butir pertanyaan dan semua butir pertanyaan dinyatakan valid dengan menggunakan 67 responden, karena nilai  $r$  hitung  $\geq$  nilai  $r$  tabel.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi dan dapat dipercaya setiap butir pertanyaan pada instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan setelah instrumen penelitian dinyatakan valid. Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* pada software SPSS 19. Menurut Apriadi (2015) kriteria dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* adalah jika  $\alpha > 0,6$ , maka instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas dari 4 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dan *tax evasion* (Y) dengan 67 responden.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.635	4

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas untuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ) dengan menggunakan 67 responden dan terdiri dari 4 butir pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0.635 > 0.6$ , yang berarti semua pertanyaan dalam variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini reliabel.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kecenderungan Personal ( $X_2$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.656	7

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas untuk variabel kecenderungan personal ( $X_2$ ) dengan menggunakan 67 responden dan terdiri dari 7 butir pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0.656 > 0.6$ , yang berarti semua pertanyaan dalam variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini reliabel.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reliabilitas Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ )**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.827	6

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas untuk variabel teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dengan menggunakan 67 responden dan terdiri dari 6 butir pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0.827 > 0.6$ , yang berarti semua pertanyaan dalam variabel teknologi sistem perpajakan ini reliabel.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas *Tax Evasion* (Y)**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.617	9

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas untuk variabel *tax evasion* (Y) dengan menggunakan 67 responden dan terdiri dari 9 butir pertanyaan. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan  $0.617 > 0.6$ , yang berarti semua pertanyaan dalam variabel *tax evasion* ini reliabel.

### 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Pengukuran statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui keadaan data secara umum melalui penyebaran data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan (*field research*) atau survei dan juga untuk mengetahui gambaran dari rata-rata (*mean*), median, modus (*mode*), minimum, dan maksimum mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dan *tax evasion* (Y) secara keseluruhan.

#### 4.3.1 Statistik Deskriptif Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_2$ )

Pengukuran statistik deskriptif menyajikan distribusi item-item dari variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ) yang terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya atas dasar karena takut terhadap hukum

perpajakan yang berlaku (X1.1 dan X1.2) dan adanya tindakan pemeriksaan (X1.3 dan X1.4). Data diperoleh dari jawaban responden Wajib Pajak Hotel melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden dan jumlah presentase.

**Tabel 4.15**  
**Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kemungkinan Terdeteksinya**  
**Kecurangan (X<sub>1</sub>)**

Indikator X1	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Jumlah	%	Rata-rata
X1.1	5	7,46	18	26,87	7	10,45	22	32,84	15	22,39	67	100	3,37
X1.2	0	0	0	0	2	2,99	41	61,19	24	35,82	67	100	4,33
X1.3	0	0	0	0	0	0	41	61,19	26	38,81	67	100	4,39
X1.4	0	0	0	0	10	14,93	31	46,27	26	38,81	67	100	4,24
Mean													4,08

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa terdapat 67 responden, terdapat 15 responden atau 22,39% yang menyatakan sangat setuju untuk indikator pertama tentang Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya atas dasar takut dengan hukum yang berlaku, yang menyatakan setuju sebesar 22 responden atau 32,84%, yang menyatakan ragu-ragu sebesar 7 responden atau 10,45%, untuk tidak setuju sebesar 18 responden atau 26,87%, dan yang menyatakan sanga tidak setuju adalah sebesar 5 responden atau 7,46%.

Untuk indikator kedua yaitu Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar untuk menghindari sanksi denda, dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 24 responden atau 35,82%, yang menyatakan setuju sebesar 41 responden atau 61,19%, untuk ragu-ragu sebesar 2 responden atau 2,99%, lalu untuk yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0 responden atau 0%.

Untuk indikator ketiga, yaitu mengenai adanya tindakan pemeriksaan pajak. Indikator ini berisi 2 (dua) item pertanyaan yaitu pada X1.3 dan X1.4. Hasil dari X1.3 tentang adanya pemeriksaan membuat Wajib Pajak membayar dengan benar, diketahui bahwa responden yang memilih sangat setuju sebesar 26 responden atau

38,81%, yang menyatakan setuju terdapat 41 responden atau 61,19%, dan yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0 responden atau 0%. Selanjutnya, untuk hasil dari X1.4 tentang melaporkan pajak dengan benar karena merasa takut jika terdapat pemeriksaan dari petugas pajak, diketahui bahwa yang menyatakan sangat setuju sebesar 26 responden atau 38,81%, yang menyatakan setuju terdapat 31 responden atau 46,27%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat 10 responden atau 14,93%, dan untuk yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 responden atau 0%.

Dari 4 (empat) indikator pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ) diketahui bahwa seluruh indikator lebih cenderung memilih skor 4 atau “setuju”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel setuju bahwa kewajiban untuk membayar pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan takut dengan hukum yang berlaku dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Wajib Pajak Hotel takut dengan adanya pemeriksaan karena jika terbukti bersalah, akan menyebabkan sanksi denda yang dibayarkan lebih besar.

#### **4.3.2 Statistik Deskriptif Variabel Kecenderungan Personal ( $X_3$ )**

Pengukuran statistik deskriptif menyajikan distribusi item-item dari variabel kecenderungan personal ( $X_2$ ) yang terdiri atas 2 indikator yaitu perlawanan pasif yang terdiri dari 5 pertanyaan dan perlawanan aktif yang terdiri dari 2 pertanyaan. Data diperoleh dari jawaban responden Wajib Pajak Hotel melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden dan jumlah presentase.



**Tabel 4.16**  
**Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Kecenderungan Personal (X<sub>2</sub>)**

Indikator X <sub>2</sub>	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Jumlah	%	Rata-rata
X2.1	10	14,93	31	46,27	15	22,39	9	13,43	2	2,99	67	100	2,43
X2.2	8	11,94	27	40,30	7	10,45	22	32,84	3	4,48	67	100	2,78
X2.3	26	38,81	28	41,79	5	7,46	6	8,96	2	2,99	67	100	1,96
X2.4	5	7,46	19	28,36	13	19,40	24	35,82	6	8,96	67	100	3,10
X2.5	17	25,37	41	61,19	6	8,96	3	4,48	0	0,00	67	100	1,93
X2.6	11	16,42	16	23,88	19	28,36	17	25,37	4	5,97	67	100	2,81
X2.7	24	35,82	32	47,76	10	14,93	1	1,49	0	0,00	67	100	1,82
Mean													2,40

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa terdapat 67 responden, terdapat sebesar 2 responden atau 2,99% yang menyatakan sangat setuju untuk indikator pertama yaitu tentang perlawanan pasif berupa menyembunyikan jumlah kamar yang terjual agar pajak terutang menjadi kecil (X2.1), yang menyatakan setuju terdapat sebesar 9 responden atau 13,43%, yang menyatakan ragu-ragu sebesar 15 responden atau 22,39%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 31 responden atau 46,27%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 10 responden atau 14,93%.

Untuk item pertanyaan kedua yaitu cara menghitung dan pengisian formulir pajak yang rumit (X2.2), dapat diketahui bahwa terdapat sebesar 3 responden atau 4,48% yang menyatakan sangat setuju, untuk yang menyatakan setuju terdapat sebesar 22 responden atau 32,84%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 7 responden, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 27 responden atau 40,30%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 8 responden atau 11,94%.

Untuk item pertanyaan ketiga yaitu prosedur pembayaran pajak yang berbelit-belit (X2.3), dapat diketahui bahwa terdapat sebesar 2 responden atau 2,99% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 6 responden atau

8,96%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 5 responden atau 7,46%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 28 responden atau 41,79%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 26 responden atau 38,81%.

Untuk item pertanyaan keempat, yaitu tidak adanya penyuluhan tentang sistem perpajakan (X2.4), diketahui bahwa terdapat sebesar 6 responden atau 8,96% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 24 responden atau 35,82%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 13 responden atau 19,40%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 19 responden atau 28,36%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 5 responden atau 7,46%.

Untuk item pertanyaan kelima, yaitu kurangnya pemahaman mengenai sistem perhitungan pajak hotel (X2.5), diketahui tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, terdapat sebesar 3 responden atau 4,48% yang menyatakan setuju, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 6 responden atau 8,96%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 41 responden atau 61,19%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 17 responden atau 25,37%.

Pada indikator kedua mengenai perlawanan aktif, untuk item pertanyaan pertama, yaitu menghindari jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (X2.6) terdapat sebesar 4 responden atau 5,97% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 17 responden atau 25,37%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 19 responden atau 28,38%, yang menyatakan tidak setuju terdapat 16 responden atau 23,88%, dan untuk menyatakan sangat tidak setuju terdapat 11 responden atau 16,42%.

Untuk item pertanyaan kedua, yaitu menghindari jumlah pajak yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan (X2.7), diketahui bahwa

tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 1 responden atau 1,49%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 10 responden atau 14,93%, yang menyatakan tidak setuju terdapat 32 responden atau 47,76%, dan untuk menyatakan sangat tidak setuju terdapat 24 responden atau 35,82%.

Dari 2 indikator yang berisi 7 pertanyaan pada variabel kecenderungan personal ( $X_2$ ) diketahui bahwa seluruh indikator lebih cenderung memilih skor 2 atau “tidak setuju”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak banyak yang merasa tidak setuju untuk melakukan perlawanan pajak baik secara pasif maupun aktif.

#### **4.3.3 Statistik Deskriptif Variabel Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ )**

Pengukuran statistik deskriptif menyajikan distribusi item-item dari variabel teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) yang terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan ( $X_{3.1}$ ), memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak ( $X_{3.2}$ ), akses informasi perpajakan yang mudah ( $X_{3.3}$ ), pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan ( $X_{3.4}$ ), dan pelaporan dan penyetoran pajak hotel menggunakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ( $X_{3.5}$  dan  $X_{3.6}$ ). Data diperoleh dari jawaban responden Wajib Pajak Hotel melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden dan jumlah presentase.

**Tabel 4.17**  
**Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Teknologi Sistem Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

Indikator X3	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Jumlah	%	Rata-rata
X3.1	0	0	1	1,49	6	8,96	31	46,27	29	43,28	67	100	4,31
X3.2	3	4,48	10	14,93	21	31,34	24	35,82	9	13,43	67	100	3,39
X3.3	5	7,46	27	40,30	9	13,43	19	28,36	7	10,45	67	100	2,94
X3.4	9	13,43	27	40,30	7	10,45	17	25,37	7	10,45	67	100	2,79
X3.5	9	13,43	34	50,75	4	5,97	14	20,90	6	8,96	67	100	2,61
X3.6	0	0	0	0	2	2,99	39	58,21	26	38,81	67	100	4,36
Mean													3,40

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa terdapat 67 responden, terdapat 29 responden atau 43,28% yang menyatakan sangat setuju pada indikator pertama yaitu ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan (X3.1), yang menyatakan setuju terdapat sebesar 31 responden atau 46,27%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 6 responden atau 8,96%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 1 responden atau 1,49%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Untuk indikator kedua, yaitu memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak (X3.2), diketahui bahwa terdapat sebesar 9 responden atau 13,43% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 24 responden atau 35,82%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 21 responden atau 31,34%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 10 responden atau 14,93% dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 3 responden atau 4,48%.

Untuk indikator ketiga, yaitu akses informasi perpajakan yang mudah (X3.3), diketahui bahwa terdapat sebesar 7 responden atau 10,45% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 19 responden atau 28,36%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 9 responden atau 13,43%, yang menyatakan

tidak setuju terdapat sebesar 27 responden atau 40,30, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 5 responden atau 7,46%.

Untuk indikator keempat, yaitu pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan (X3.4), diketahui bahwa terdapat sebesar 7 responden atau 10,45% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 17 responden atau 25,37%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 7 responden atau 10,45%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 27 responden atau 40,30%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 9 responden atau 13,43%.

Untuk indikator kelima, yaitu pelaporan dan penyetoran pajak hotel menggunakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Indikator ini terdiri dari 2 item pertanyaan. Item pertanyaan pertama mengenai melaporkan pajak hotel menggunakan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pajak (X3.5), diketahui bahwa terdapat sebesar 6 responden atau 8,96% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 14 responden atau 20,90%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 4 responden atau 5,97%, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 34 responden atau 50,75%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 9 responden atau 13,43%. Selanjutnya untuk item pertanyaan kedua, yaitu menyetorkan pajak hotel melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah (X3.6), diketahui bahwa terdapat 26 responden atau 38,81% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 39 responden atau 58,21%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 2 responden atau 2,99%, dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Dari 5 (lima) indikator pada variabel teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) diketahui bahwa seluruh indikator lebih cenderung memilih skor 2 atau “tidak setuju”. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Hotel yang belum dapat memanfaatkan penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang secara maksimal.

#### 4.3.4 Statistik Deskriptif Variabel *Tax Evasion* (Y)

Pengukuran statistik deskriptif menyajikan distribusi item-item dari variabel *tax evasion* (Y) yang terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWPD (Y1), tidak menyampaikan SPTPD (Y2), menyampaikan SPTPD dengan tidak benar (Y3), tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong (Y4 dan Y5), dan berusaha menyuap petugas (Y7, Y8, Y9, dan Y10). Data diperoleh dari jawaban responden Wajib Pajak Hotel melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden dan jumlah presentase.

**Tabel 4.18**  
**Tabel Distribusi Frekuensi Variabel *Tax Evasion* (Y)**

Indikator Y	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	Jumlah	%	Rata-rata
Y1	32	47,76	30	44,78	4	5,97	1	1,49	0	0	67	100	1,40
Y2	19	28,36	13	19,40	13	19,40	20	29,85	2	2,99	67	100	2,37
Y3	28	41,79	18	26,87	7	10,45	14	20,90	0	0	67	100	2,10
Y4	45	67,16	21	31,34	1	1,49	0	0	0	0	67	100	1,34
Y5	30	44,78	20	29,85	15	22,39	2	2,99	0	0	67	100	1,84
Y7	57	85,07	10	14,93	0	0	0	0	0	0	67	100	1,15
Y8	54	80,60	13	19,40	0	0	0	0	0	0	67	100	1,19
Y9	55	82,09	12	17,91	0	0	0	0	0	0	67	100	1,18
Y10	55	82,09	12	17,91	0	0	0	0	0	0	67	100	1,13
Mean													1,52

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa terdapat 67 responden, tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju pada indikator pertama yaitu tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWPD (Y1), yang menyatakan setuju terdapat sebesar 1 responden atau 1,49%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 4 responden atau 5,97%, yang menyatakan tidaks setuju terdapat 30

responden atau 44,78%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 32 responden atau 47,76%.

Untuk indikator kedua, yaitu tidak menyampaikan SPTPD (Y2), diketahui bahwa terdapat sebesar 2 responden atau 2,99% yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat 20 responden 29,85%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 13 responden atau 19,40%, yang menyatakan tidak setuju terdapat 13 responden atau 19,40%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 19 responden atau 28,36%.

Untuk indikator ketiga, yaitu menyampaikan SPTPD dengan tidak benar (Y3), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 14 responden atau 20,90%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 7 responden atau 10,45%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 18 responden atau 26,87%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 28 responden atau 41,79%.

Untuk indikator keempat, yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. Dalam indikator ini berisi 2 item pertanyaan. Untuk item pertanyaan pertama mengenai menyetorkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPTPD (Y4), diketahui tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 1 responden atau 1,49%, yang menyatakan tidak setuju terdapat 21 responden atau 31,34%, dan untuk yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 45 responden atau 67,16%. Selanjutnya untuk item pertanyaan kedua yaitu mengenai tidak menyetorkan jumlah pajak terutang secara langsung ke BP2D namun digunakan terlebih dahulu untuk keperluan lainnya (Y5), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan

sangat setuju, yang menyatakan setuju terdapat sebesar 2 responden atau 2,99%, yang menyatakan ragu-ragu terdapat sebesar 15 responden atau 22,39%, yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 20 responden atau 29,85%, dan untuk menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 30 responden atau 44,78%.

Untuk indikator kelima, yaitu berusaha menyuap petugas pajak. Dalam indikator ini terdapat 4 item pertanyaan. Untuk item pertanyaan pertama mengenai berusaha memperkecil jumlah pajak dengan menyuap petugas (Y7), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, setuju, dan ragu-ragu, untuk yang menyatakan tidak setuju terdapat 10 responden atau 14,93%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 57 responden atau 85,07%. Untuk pertanyaan kedua mengenai melakukan penyuapan pajak melalui makelar (Y8), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, setuju, dan ragu-ragu, untuk yang menyatakan tidak setuju terdapat sebesar 13 responden atau 19,40%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 54 responden atau 80,60%. Untuk item pertanyaan ketiga mengenai berusaha melakukan penyuapan dengan petugas pajak dengan mengatakan secara terang-terangan (Y9), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, setuju, dan ragu-ragu, untuk yang menyatakan tidak setuju terdapat 12 responden atau 17,91%, dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat 55 responden atau 82,09%. Untuk item pertanyaan keempat yaitu mengenai berusaha mengurangi beban pajak dengan memberikan hadiah kepada fiskus (Y10), diketahui bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat setuju, setuju, dan ragu-ragu, untuk yang menyatakan tidak setuju terdapat 12 responden atau 17,91%, dan



responden yang menyatakan sangat tidak setuju terdapat sebesar 55 responden atau 82,09%.

Dari 5 (lima) indikator pada variabel *tax evasion* (Y) diketahui bahwa seluruh indikator lebih cenderung memilih skor 1 atau “sangat tidak setuju”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan melakukan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4.3.5 Statistik Deskriptif Semua Variabel Dalam Penelitian

Pengukuran statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui mean, meadian, modus (*mode*), standar deviasi, minimum, dan maksimum dari semua variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dan *tax evasion* (Y) dengan 67 responden.

**Tabel 4.19**  
**Statistik Deskriptif Semua Variabel**

Statistics					
		X1	X2	X3	Y
N	Valid	67	67	67	67
	Missing	0	0	0	0
Mean		4,0821	2,4031	3,4007	1,5460
Median		4,0000	2,4300	3,1700	1,5600
Mode		4,25	2,57	3,00	1,56
Std. Deviation		,57140	,57962	,75416	,35077
Minimum		3,00	1,00	2,17	1,00
Maximum		5,00	3,86	5,00	2,44

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 67 responden dan dinyatakan valid seluruhnya.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ) memiliki mean 4,0821, median 4,000, modus (*mode*) 4,25, standar deviasi 0,57140, minimum 3,00, dan maksimum 5,00. Variabel kecenderungan personal ( $X_2$ ) memiliki mean 2,4031, median 2,4300, modus (*mode*) 2,57, standar deviasi 0,57962, minimum 1,00, dan maksimum 3,86. Variabel teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) memiliki mean 3,4007, median 3,1700, modus (*mode*) 3,00, standar deviasi 0,75416, minimum 2,17, dan maksimum 5,00. Variabel *tax evasion* ( $Y$ ) memiliki mean 1,5460, median 1,5600, modus (*mode*) 1,56, standar deviasi 0,35077, minimum 1,00, dan maksimum 2,44.

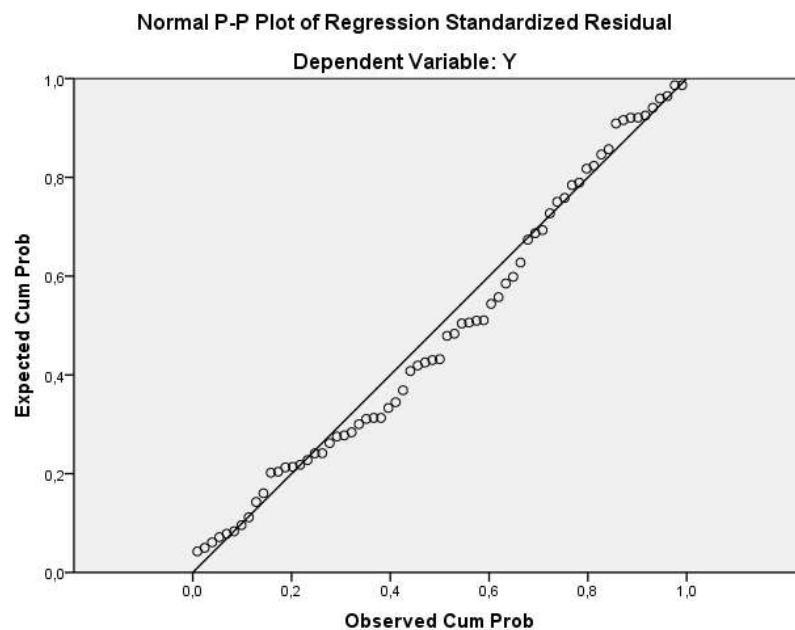
#### **4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

##### **4.4.1 Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah regresi variabel independen dan variabel dependen sudah berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan *Kolmogorov Smirnov* pada SPSS 19 yang akan menunjukkan bahwa model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tampilan dari grafik normal plot atau data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah di sepanjang garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan melihat grafik, dalam penelitian ini juga menggunakan normalitas data dengan uji non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* pada *alpha* sebesar 5%. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorov Smirnov* pada SPSS 19 lebih besar dari 0,05 berarti data normal.

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Normallitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			67
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,77497938
Most Extreme Differences	Absolute		,086
	Positive		,086
	Negative		-,063
Kolmogorov-Smirnov Z			,705
Asymp. Sig. (2-tailed)			,703

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0.703 dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hal tersebut berarti bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

#### 4.4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas. Dalam pengujian ini dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$  maka hasil pengujian bebas dari masalah multikolonieritas.

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,987	1,013
X2	,971	1,029
X3	,972	1,029

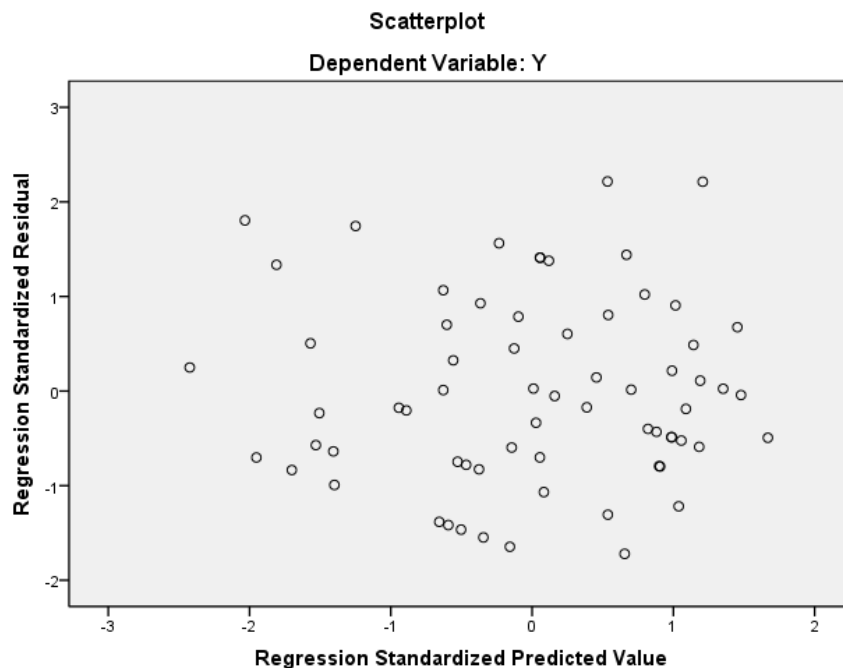
Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan hasil bahwa untuk setiap variabel bebas, yang terdiri dari variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) dan *tax evasion* ( $Y$ ), memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ . Kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai tolerance 0,987 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai 1,013. Kecenderungan personal memiliki nilai tolerance 0,971 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai 1,029. Teknologi sistem perpajakan memiliki nilai tolerance 0,972 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai 1,029. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak terdapat korelasi dan bebas dari masalah multikolonieritas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

#### **4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel (Rahman, 2013). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut heterokedastisitas.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan gambar di atas, grafik *scatter plot* menunjukkan bahwa data tersebar secara acak, baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model ini layak digunakan untuk memprediksi *tax evasion* berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ).

## 4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini bertujuan untuk untuk mengukur seberapa jauhkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel-variabel bebas (X), yaitu variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ).

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,474 <sup>a</sup>	,225	,188	2,840

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 0.188 atau 18,8%. Variabel terikat (Y) yaitu *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X) yang terdiri dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan sebesar 18,8%. Sehingga pengaruh variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan sebesar 18,8%, sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi dan dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya diskriminasi, *tax morale*, ketepatan pengalokasian pajak, dan keadilan pajak.

#### 4.5.2 Hasil Uji F

Pengujian ini digunakan untuk untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh dengan variabel dependen secara serempak. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah ( $\alpha = 0,05$ ). Dalam pengujian ini, jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan probabilitas  $< 0,05$ , maka hipotesis akan diterima dan begitupun sebaliknya. F tabel dalam penelitian ini adalah 2,75.

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147,229	3	49,076	6,083	,001 <sup>a</sup>
	Residual	508,234	63	8,067		
	Total	655,463	66			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  adalah  $6,083 > 2,75$  dan tingkat signifikansi  $0,001 < 0,05$ , sehingga hipotesis diterima. Jadi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang.

#### 4.5.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini berguna untuk memprediksi besarnya variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y). Untuk mengetahui hasil uji menggunakan uji t yang dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  pada variabel independen dengan tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ ). Dapat juga dikatakan jika Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ , maka hasilnya signifikan dan berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sedangkan jika Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka hasilnya tidak signifikan dan berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.



**Tabel 4.24**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Beta		
1	(Constant)		5,211	,000
	X1	-,115	-1,031	,306
	X2	,253	2,252	,028
	X3	-,332	-2,946	,005

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah, 2017.

#### 4.5.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) berarah negatif sebesar -0,115, yang berarti jika variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan bertambah 1 (satu) satuan, maka variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan berkurang sebesar 0,115 satuan atau 11,5%. Nilai t tabel ( $\alpha = 0,05$ ; df residual = 63) adalah sebesar 1,998. Nilai t hitung -1,031 menunjukkan bahwa  $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$  atau  $-1,031 > -1,998$ , sehingga  $H_1$  ditolak. Nilai signifikansi juga  $0,306 > 0,05$ , menunjukkan bahwa berpengaruh tidak signifikan. Hal tersebut berarti bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

#### 4.5.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi pada variabel kecenderungan personal (X2) berarah positif sebesar 0,253, yang berarti jika variabel kecenderungan personal bertambah 1 (satu) satuan, maka variabel

kecenderungan personal akan bertambah sebesar 0,253 satuan atau 25,3%. Nilai  $t$  tabel ( $\alpha = 0,05$ ;  $df$  residual = 63) adalah sebesar 1,998. Nilai  $t$  hitung 2,252 menunjukkan bahwa  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $2,252 > 1,998$ , sehingga  $H_2$  diterima. Nilai signifikansi juga  $0,028 < 0,05$ , menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan. Hal tersebut berarti bahwa kecenderungan personal dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

#### 4.5.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan data di atas menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi pada variabel teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) berarah negatif sebesar -0,332, yang berarti jika variabel kecenderungan personal bertambah 1 (satu) satuan, maka variabel kecenderungan personal akan berkurang sebesar 0,332 satuan atau 33,2%. Nilai  $t$  tabel ( $\alpha = 0,05$ ;  $df$  residual = 63) adalah sebesar 1,998. Nilai  $t$  hitung -2,946 menunjukkan bahwa  $-t$  hitung  $< -t$  tabel atau  $-2,946 < -1,998$ , sehingga  $H_3$  diterima. Nilai signifikansi juga  $0,005 < 0,05$ , menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan. Hal tersebut berarti bahwa teknologi sistem perpajakan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

#### 4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 19, terkait pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan ( $X_1$ ), kecenderungan personal ( $X_2$ ), dan teknologi sistem perpajakan ( $X_3$ ) terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.6.1 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ( $X_1$ ) terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel di Kota Malang (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai  $-t$  hitung lebih besar dari  $-t$  tabel ( $-1,031 > -1,998$ ) dan juga nilai signifikansinya lebih besar dari 5% ( $0,306 > 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ( $H_1$ ) yang berbunyi “Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.”, **ditolak**. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak maka tidak akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Hasil temuan ini mendukung penelitian dari Sari (2015), yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Dari hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ayu (2011), Yusmarwandi (2014), Ulfa (2015), dan Yurika (2016), dimana dari semua hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Indikator dalam variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, meliputi Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan takut dengan hukum perpajakan yang berlaku, Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar untuk menghindari sanksi denda, dan adanya tindakan pemeriksaan pajak. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator utama yang membentuk variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan dikarenakan melalui pemeriksaan pajak yang rutin Wajib Pajak akan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Wajib Pajak akan merasa takut jika perbuatan tersebut diketahui oleh

petugas pajak sehingga dilakukan pemeriksaan dan menyebabkan Wajib Pajak akan mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membayar sanksi daripada pajak yang dibayarkan. Dengan terungkapnya tindakan kecurangan, maka Wajib Pajak harus menerima konsekuensi pembayaran pajak yang lebih besar yang meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, sanksi berupa denda, dan kenaikan pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, yang berarti bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka tingkat *tax evasion* semakin rendah.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion* pemungutan pajak hotel, yang berarti bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan sangat rendah sehingga menyebabkan tingginya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Salah satu penyebab rendahnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, sehingga Wajib Pajak memiliki celah untuk dapat melakukan tindakan *tax evasion*.

Responden dalam penelitian ini cenderung untuk merespon sikap positif terhadap adanya *tax evasion* dikarenakan rendahnya tingkat pemeriksaan yang dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak Hotel untuk tidak melaporkan jumlah kamar yang terjual dengan sebenarnya. Norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian

yang positif terhadap *tax evasion* ditunjukkan dengan adanya dorongan dan pengaruh faktor lain dari luar, seperti adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Responden menunjukkan respon setuju jika adanya pemeriksaan pajak yang rutin membuat Wajib Pajak Hotel melaporkan pajak dengan benar karena merasa takut jika terdapat pemeriksaan dari petugas pajak dan akan menimbulkan sanksi denda yang besar. Keyakinan akan tingginya tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak semakin mendorong Wajib Pajak untuk cenderung patuh dan tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

Berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), tindakan tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak Hotel memiliki sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian yang positif terhadap *tax evasion*, sehingga Wajib Pajak Hotel cenderung untuk memanfaatkan celah yang ada dengan melakukan *tax evasion* untuk dapat memaksimalkan penerimaan hotel. Hasil ini mendukung adanya kasus penggelapan pajak di Kota Malang, yaitu ditemukannya sebesar 70 persen Wajib Pajak Hotel diketahui menggelapkan pajak. Hal ini dikarenakan adanya dugaan jika Wajib Pajak Hotel tidak melaporkan sesuai jumlah kamar yang terjual, melainkan hanya target dari setiap periodenya.

Gunadi (2005) dalam Setia (2015) pemeriksaan pajak hanya cenderung fokus kepada Wajib Pajak Hotel yang memiliki data transaksi usaha yang besar karena kemungkinan untuk melakukan tindakan *tax evasion* yang semakin besar, karena bagi Wajib Pajak Hotel yang melaporkan penghasilan jumlah kamar yang terjual dibawah penghasilan yang sebenarnya tingkat kemungkinan terdeteksi akan semakin kecil. Selain itu, Rhoades (1996) dalam Setia (2015) menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dapat pula menimbulkan kesalahan pendeteksian, dan jika terjadi

maka akan mengakibatkan timbulnya *tax evasion* baru, sehingga harus terdapat *trade off* antara pemeriksaan pajak dengan perlindungan hak Wajib Pajak agar patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

#### **4.6.2 Pengaruh Kecenderungan Personal ( $X_2$ ) terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel di Kota Malang (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,252 > 1,998$ ) dan juga nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,028 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ( $H_2$ ) yang berbunyi “Kecenderungan personal berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang”, **diterima**. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecenderungan personal, maka akan semakin tinggi tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014) yang menyatakan bahwa kecenderungan personal berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa kecenderungan personal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Indikator dalam variabel kecenderungan personal, meliputi perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Perlawanan pajak muncul dikarenakan adanya sikap personal dari pribadi masing-masing individu baik secara pasif maupun aktif. Sumarsan (2013: 8) menjelaskan bahwa perlawanan secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan

tujuan untuk menghindari pajak. Tarik menarik kedua hal tersebutlah yang kemudian membuat orang untuk cenderung mengambil resiko untuk melanggar hukum dengan melakukan *tax evasion* atau tidak (Ayu dan Hastuti, 2009). Sehingga semakin tinggi kecenderungan diri wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*, maka akan semakin tinggi pula *tax evasion* yang diukur

Berbagai tindakan perlawanan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya ataupun untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Hal ini terlihat dari adanya perlawanan pasif yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang merasa sistem tatacara perhitungan dan pengisian formulir yang rumit disebabkan karena belum semua Wajib Pajak Hotel mengetahui dan paham mengenai sistem perhitungan pajak hotel yang berlaku. Kurangnya pemahaman tersebut bisa dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kepada Wajib Pajak Hotel di Kota Malang, sehingga menimbulkan usaha dari Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan pajak dengan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain itu sulit dan rumitnya prosedur pembayaran pajak akan membuka celah untuk Wajib Pajak dalam melakukan negosiasi dengan petugas pajak. Bentuk perlawanan pasif lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel adalah dengan tidak melaporkan seluruh jumlah kamar yang terjual dan hanya menggunakan metode target jumlah kamar yang terjual dalam melaporkan pajak terutangnya agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil.

Sedangkan untuk perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan

adanya persepsi Wajib Pajak yang menganggap bahwa cara tersebut legal dan dibenarkan. Namun, terdapat juga persepsi wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sama halnya dengan adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh kamar yang terjual dan hanya menggunakan metode target dalam melaporkan jumlah pajak terutanganya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini memiliki kaitan dengan model penelitian dalam *Theory Planned of Behavior* (TPB). Wajib Pajak Hotel telah memiliki sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian yang positif terhadap *tax evasion*. Dalam hal ini ditunjukkan dengan sikap Wajib Pajak Hotel cenderung merespon negatif dengan melakukan perlawanan pajak kepada pemerintah dikarenakan Wajib Pajak Hotel merasa tidak ada manfaat yang diperoleh atau timbal balik yang diterima dari pemerintah. Norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian ditunjukkan dengan adanya pengaruh dari pemilik hotel, konsultan, maupun Wajib Pajak yang lain yang mendorong Wajib Pajak Hotel untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Selain itu sulitnya sistem birokrasi membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak. Tindakan perlawanan pajak tersebutlah yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menggelapkan pajak. Wajib Pajak yang memiliki sikap positif untuk tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka niat untuk melakukan penggelapan pajaknya semakin tinggi (Wanarta, 2014).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu an Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa kecenderungan pribadi bukan menjadi hal



yang berpengaruh pada perilaku *tax evasion* Wajib Pajak dikarenakan ketakutan Wajib Pajak untuk diperiksa lebih dominan jika melakukan perlawanan pajak. Sedangkan penelitian Yurmarwandi (2014) diketahui bahwa kecenderungan personal untuk melakukan *tax evasion* tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya faktor yang merasa bahwa sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang sangat rumit, sehingga Wajib Pajak cenderung untuk mengambil resiko melakukan perlawanan pajak agar pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Semakin tinggi tingkat kecenderungan personal maka tingkat penggelapan pajaknya juga akan semakin tinggi.

#### **4.6.3 Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap *Tax Evasion* Pada Pajak Hotel di Kota Malang (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai -t hitung lebih kecil dari -t tabel ( $-2,946 < -1,998$ ) dan juga nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ( $0,005 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ( $H_3$ ) yang berbunyi “Teknologi sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang”, **diterima**. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi teknologi sistem perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) dan Ulfa (2015) yang menyatakan dari semua hasil tersebut bahwa teknologi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Dari hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan Yurika (2016) yang menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Pandiangan (2008) menyatakan bahwa salah satu modernisasi perpajakan yang dilakukan adalah adanya penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan. Teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan untuk mempermudah cara pembayaran dan pelaporan bagi Wajib Pajak. *E-tax* merupakan proses pembaruan di bidang teknologi yang berkaitan dengan sistem perpajakan. Dugaan dibuatnya teknologi sistem perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion* yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (Ayu dan Hastuti, 2009). Hal tersebut berarti teknologi sistem perpajakan atau *e-tax* ini merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penggunaan *e-tax* diharapkan dapat memadai sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak Hotel karena mempermudah Wajib Pajak Hotel dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya tanpa menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang akan dibayarkan. Seluruh jumlah pajak yang akan dibayarkan akan terekam secara otomatis melalui data transaksi pembayaran hotel pada sistem yang terhubung pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Selain itu Wajib Pajak Hotel juga dimudahkan dalam proses penyetoran pajak yang terpusat pada bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Silent *et al* (2005) dalam Yurika (2016) Sehingga dengan adanya fasilitas teknologi sistem perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini, yaitu teknologi sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion* pemungutan pajak hotel di Kota Malang menunjukkan bahwa adanya fasilitas teknologi di bidang perpajakan dapat mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya. Responden dalam penelitian ini menunjukkan respon positif dengan adanya *e-tax* yang dibuat oleh pemerintah. Adanya *e-tax* membuat Wajib Pajak Hotel terfasilitasi dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena memberikan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya. Norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian mengarah pada persepsi wajib Pajak Hotel terhadap mudah atau tidaknya dalam melakukan pemanfaatan teknologi sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk dapat memaksimalkan penggunaan *e-tax* dengan baik.

Dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB) pemanfaatan teknologi sistem perpajakan dapat dikaitkan dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Wajib Pajak Hotel akan cenderung merespon positif adanya *e-tax* ini dikarenakan dapat menghemat waktu, akurat, *paperless*, meningkatkan kepatuhan, dan kepercayaan kepada administrasi perpajakan. Adanya *e-tax* ini diharapkan dapat meminimalisir adanya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Keyakinan akan teknologi sistem perpajakan yang baik semakin membuat Wajib Pajak Hotel terdorong untuk dapat berperilaku dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas *e-tax* tersebut.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan Yurika (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa teknologi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan teknologi dan informasi perpajakan yang masih rendah yang disebabkan

oleh sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran secara manual dan jarang membuka *website* dari Dirjen Pajak, sehingga faktor tersebut bukan merupakan faktor yang mempengaruhi. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan Permatasari (2013) dan Ulfa (2015) yang dapat membuktikan bahwa teknologi sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalisasi *tax evasion* secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan teknologi sistem perpajakan maka semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini berjumlah 67 Wajib Pajak Hotel yang ada di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini setuju bahwa pemeriksaan rutin merupakan salah satu cara untuk dapat mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Semakin rendah kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak maka akan mempengaruhi tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian yang positif terhadap *tax evasion* membuat perilaku Wajib Pajak cenderung untuk terdorong melakukan tindakan *tax evasion* karena adanya celah bagi Wajib Pajak Hotel untuk dapat melakukan tindakan tersebut. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015).
2. Kecenderungan personal berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Semakin tinggi tingkat kecenderungan personal, maka akan

semakin tinggi tindakan *tax evasion* yang dilakukan. Responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax evasion* terjadi karena adanya perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel. Perlawanan pajak ini terjadi karena Wajib Pajak Hotel merasa belum ada manfaat yang diterima secara langsung dan sistem birokrasi yang cenderung rumit dan berbelit sehingga menyusahkan Wajib Pajak Hotel dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Munculnya permasalahan tersebut membuat Wajib Pajak Hotel cenderung melakukan perlawanan baik secara aktif maupun pasif. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian, permasalahan tersebutlah yang mendorong Wajib Pajak Hotel untuk bersikap untuk tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan cenderung melakukan perlawanan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmarwandi (2014).

3. Teknologi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Responden dalam penelitian ini sudah memahami adanya *e-tax* di Kota Malang yang diketahui dari tanggapan responden atas pernyataan yang ada pada indikator. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), responden telah menunjukkan sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian yang positif terhadap adanya *e-tax*. Diketahui bahwa semakin tinggi teknologi sistem perpajakan, maka akan semakin rendah tindakan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak merasa terfasilitasi dan dimudahkan dalam peyeteran dan pelaporan pajak. Dengan adanya sistem yang terhubung secara otomatis dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang pada masing-masing hotel membuat Wajib Pajak Hotel tidak

perlu menghitung besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Sehingga dengan adanya teknologi sistem perpajakan membuat Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) dan Ulfa (2015).

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dalam menguji hipotesis, memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Sehingga data yang didapatkan bisa saja bias, karena adanya perbedaan daya tangkap dan persepsi dari responden pada setiap poin-poin pernyataan yang ada dalam kuesioner.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dirasa kurang tepat karena sebesar 87% adalah karyawan bagian akuntansi dan keuangan hotel, sedangkan sisanya 13% adalah manajer keuangan hotel. Dalam kaitannya dengan tindakan *tax evasion* manajer keuangan lebih berperan dalam pengambilan keputusan strategis untuk menentukan tindakan yang akan diambil dan dirasa lebih tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
3. Nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan, kecenderungan personal, dan teknologi sistem perpajakan sebagai variabel independen hanya dapat menjelaskan *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang sebagai variabel dependen sebesar 18,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lain yang dapat menjelaskan pengaruh *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang masih cukup banyak. Namun, karena penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel tersebut, maka peneliti tidak dapat menjelaskan variabel-variabel lain yang mempengaruhi *tax evasion* pada pajak hotel di Kota Malang.

### 5.3 Saran

Adapun saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus untuk meneliti *tax evasion* pajak hotel yang ada pada wilayah Kota Malang saja. Oleh karena itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, sehingga dapat meneliti lebih banyak kembali Wajib Pajak Hotel yang melakukan tindakan *tax evasion*.
2. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel yang lebih besar kembali dari penelitian ini, agar hasil yang didapatkan bisa lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel pemilik hotel atau manajer keuangan hotel karena dirasa lebih tepat dan paham mengenai tindakan *tax evasion*.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang mungkin saja dapat mempengaruhi Wajib Pajak Hotel dalam melakukan tindakan *tax evasion*, dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data sekunder yang menunjukkan seberapa besar tingkat *tax evasion* yang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak.
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti Wajib Pajak yang lain, seperti Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Parkir dan lain-lain.



### Daftar Pustaka

- Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50: 179-211.
- Albrecht, W. Steve., & Conan C. Albrecht, Chad o. Albrecht, Mark F. Zimbelman. (2011). *Fraud Eximination*. Edisi 4. Mason Ohio: South- Western Cengage Learning.
- Apriadi, Rangga Nuh. (2015). *Determinan Terjadinya Fraud pada Institusi Pemerintahan (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ardian, Raden Devi. (2014). *Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)*. Jurnal Eproc Universitas Telkom Bandung.
- Arie Wahyuni, Made. (2011). *Tax Evasion : Dampak dari Self Assessment System*. Undiks Journal vol 1, No 1.
- Aryati. (2016). *Pengaruh Pemanfaatan teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 No. 3 pp: 63-77.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2006). *Report to nation on Occupational Fraud & Abuse*. The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Ayu, Stephana Dyah. (2011). *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*. Jurnal Seri Kajian Ilmiah, Vol. 14 No. 1.
- Ayu, Stephana Dyah & Hastuti, Rini. (2009). *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Trrdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)*. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol.1 1 No. 1.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2016). *Kota Malang Dalam Angka*. Surabaya: CV. Bima Media Mandiri.
- Candra, Wibisono, & Mujilan. (2013). *Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, Vol. 1 No. 1.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan VII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Bawono, & Dara. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heider, Fritz. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Willey, pp 322.
- Hidayat. (2010). *Studi Emipiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93.

- Irawati, Dahlia. (2016, Desember 2016). *Wisata Malang Raya Diminati*. Diakses dari <http://travel.kompas.com/read/2015/12/12/103500227/Wisata.Malang.Raya.Diminati>.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan, edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- John, Robert, & Michael. (2005). *Organizational Behavior And Management, 7th ed.* McGraw-Hill Companies.
- Kelley, Harold H. (1980). *Attribution Theory And Research*. Psychol 31:457-501. Los Angeles: University of California .
- Kusumastuti. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 1, No 1.
- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Mon. (2016, Desember 18). *Tujuh Puluhan Persen Hotel di Malang Gelapkan Pajak*. Pelita. Diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13422>.
- Nugroho, Sigit. (2007). *Dasar-Dasar Metode Statistika*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan ed 3*. Jakarta: Granit.
- O’Gara, John D. (2004). *Corporate Fraud, Case Studies In Detection And Prevention*. Canada: John & Sons, Inc.
- Pandiangan. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Permatasari. (2013). *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, pp 1 – 10.
- Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Irma Suryani. (2013). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi. Jakarta: Univeristas Islan Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus, edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol 7, No 2.
- Sari, Trias Maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya*

- Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sekaran dan Bougie. (2013). *Research Methods for Bussiness: A Skill-Building Approach, Sixth ed.* United Kingdom: John Willey & Sons Ltd.
- Setia, Humala. (2015). *Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 17, No. 1, Juni 2015: 10-22.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silaen. (2015). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Sivo *et al.* 2006. *How Low Should You Go? Low Response Rates and the Validity of Inference in IS Questionnaire Research*. Journal of the Association for Information Systems, Vol. 7, No. 6, pp. 351-414.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia, edisi 3*. Jakarta: Indeks.
- Suminarsasi. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Electronic Theses & Dissertation Gadjah Mada University.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pendapatan Daerah, edisi 1*. Yogyakarta: Andi.
- Tuanakotta. 2016. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif, edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulfa, Auliya. (2015). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak*. Jom FEKON, Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Umar, Husein. (2003). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wanarta. (2014). *Pengaruh Sikap Ketidakepatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. Journal Tax & Accounting Review, Vol. 4, No. 1.
- Wahyuni. 2011. *Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment System*. Journal Undiksha, Vol. 1, No. 1.
- Wilkinson, Joseph W. (2000). *Accounting Information System, 4th ed.* John Willey & Son Inc.
- Yurika. (2016). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Tax Morale*

*Terhadap Tax Evasion*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yusmarwandi. (2014). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Banda Aceh)*. Jurnal Ekonomi Univeristas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan, edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Kota Malang*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tatacara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah*.

**LAMPIRAN**

### Lampiran 1: Penyesuaian Kuesioner

Indikator	Nomor	Pernyataan sebelum disesuaikan	Pernyataan setelah disesuaikan	Sumber
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	2	WP akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, daripada mengisi SPT secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.	Saya akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, daripada mengisi SPTPD secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.	Ayu dan Hastuti (2009)
	3	Jika WP diperiksa oleh fiskus terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPT, maka WP akan membayar pajak dengan benar.	Jika saya diperiksa oleh petugas pajak terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPTPD, maka saya akan membayar pajak dengan benar.	Ayu dan Hastuti (2009)
Kecenderungan Personal	1	Menurut Bapak/Ibu, dalam melakukan pelaporan pajak yang terutang berusaha menyembunyikan sebagian aset agar jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil.	Saya dalam melaporkan pajak berusaha untuk menyembunyikan sebagian jumlah kamar yang terjual agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil.	Brotodiharjo (2003) dalam Yusmarwandi (2014)
	4	Menurut Bapak/Ibu prosedur pemahaman terhadap sistem perpajakan kurang paham karena tidak adanya penyuluhan perpajakan dari petugas pajak.	Saya kurang memahami prosedur dalam sistem perpajakan dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.	Brotodiharjo (2003) dalam Yusmarwandi (2014)
	5	Menurut Bapak/Ibu, untuk menentukan besarnya jumlah perhitungan dari penghasilan netto yang dipotong pajak adalah lebih mudah dengan menggunakan kaidah norma perhitungan.	Saya kurang memahami sistem perhitungan pajak hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Brotodiharjo (2003) dalam Yusmarwandi (2014)
Teknologi Sistem	1	Tersedianya teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.	Tersedianya teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ( <i>e-</i>	Ayu dan Hastuti (2009)

Perpajakan			<i>tax</i> ).	
	2	Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai dengan kebutuhan WP.	Adanya <i>e-tax</i> memadai sesuai dengan kebutuhan WP Hotel.	Ayu dan Hastuti (2009)
	3	Akses informasi yang mudah dipahami.	Akses <i>e-tax</i> yang mudah dipahami.	Ayu dan Hastuti (2009)
	4	Pemanfaatan dengan baik oleh WP dengan adanya fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.	Adanya fasilitas <i>e-tax</i> dapat dimanfaatkan dengan baik oleh WP Hotel.	Ayu dan Hastuti (2009)
<i>Tax Evasion</i>	1	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai WP Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.	Saya berusaha menghindari pajak dengan cara tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP.	Yurika (2016)
	2	Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu.	Saya berusaha menghindari pajak dengan tidak menyampaikan SPTPD tepat pada waktunya.	Yurika (2016)
	3	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.	Saya tidak menyampaikan SPTPD secara benar agar jumlah pajak menjadi rendah.	Yurika (2016)
	4	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak yang sesungguhnya saya punya.	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPTPD.	Yurika (2016)

## Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Di tempat

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandry Dyah Ratsminassiwi

NIM : 135020301111093

Jurusan : Akuntansi

Universitas : Universitas Brawijaya

Mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kecenderungan Personal, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Pemungutan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel Di Kota Malang)”**.

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Hotel. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berpartisipasi sebagai responden dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.

Kesuksesan penelitian ini sangat bergantung pada jawaban responden. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan untuk meluangkan waktunya dan mengisi seluruh kuesioner sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya menjamin kerahasiaan dari semua pendapat/opini/jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan dalam kuesioner terlampir sesuai dengan etika penelitian. Kuesioner ini akan digunakan untuk keperluan akademis dan tidak terkait dengan (Dispenda) Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga tidak akan mempengaruhi jumlah/keringanan/sanksi pajak yang dibayarkan.

Bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i sangat berarti untuk penelitian ini, untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Chandry Dyah R



### A. Identitas Responden

*) Nama	
Jenis Hotel	( ) Hotel Berbintang ... ( ) Hotel Non Bintang
NPWPD	( ) Punya ( ) Tidak
Jenis Kelamin	( ) Laki-Laki ( ) Perempuan
Usia	( ) < 20 Tahun ( ) 20 – 30 Tahun ( ) 31 – 40 Tahun ( ) 41 – 50 Tahun ( ) > 50 Tahun
Pekerjaan	

\*) Boleh tidak diisi

### B. Petunjuk Pengisian

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Kecenderungan Personal, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Pemungutan Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel Di Kota Malang). Mohon Bapak/Ibu/Sdr/i menjawab pertanyaan dengan memberi tanda checklist ( ☒ ) pada kotak jawaban yang sudah tersedia yang dianggap tepat. Tiap pertanyaan hanya diperbolehkan untuk satu jawaban.

\*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan 1 – 29, yaitu:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya membayar pajak karena takut akan hukum perpajakan.					
2.	Saya akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan benar, daripada mengisi SPTPD secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.					
3.	Jika saya diperiksa oleh petugas pajak terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPTPD, maka saya akan membayar pajak dengan benar.					
4.	Saya selalu melaporkan pajak dengan cara benar karena merasa takut apabila ada tindakan pemeriksaan dari petugas pajak.					
5.	Saya tidak membayar pajak dengan benar dikarenakan salah dalam memahami ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.					
6.	Saya dalam melaporkan pajak berusaha untuk menyembunyikan sebagian jumlah kamar yang terjual agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi kecil.					
7.	Saya melaporkan pajak secara tidak benar karena sistem tatacara perhitungan dan pengisian formulir pajak sangat rumit.					
8.	Saya menganggap sulitnya prosedur pembayaran pajak dapat membuka celah untuk melakukan negosiasi dengan petugas pajak.					
9.	Saya kurang memahami prosedur dalam sistem perpajakan dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.					
10.	Saya kurang memahami sistem perhitungan pajak hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
11.	Saya selalu melakukan pembayaran pajak dengan menghindari jumlah pajak agar berkurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.					
12.	Saya selalu melakukakan pembayaran pajak dengan menghindari jumlah pajak agar berkurang dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.					

13.	Tersedianya teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ( <i>e-tax</i> ).					
14.	Adanya <i>e-tax</i> memadai sesuai dengan kebutuhan WP Hotel.					
15.	Akses <i>e-tax</i> yang mudah dipahami.					
16.	Adanya fasilitas <i>e-tax</i> dapat dimanfaatkan dengan baik oleh WP Hotel.					
17.	Saya melaporkan data transaksi usaha melalui <i>e-tax</i> .					
18.	Saya menyetorkan pajak dengan <i>e-tax</i> melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.					
19.	Saya sengaja memanipulasi data pada <i>e-tax</i> yang disediakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.					
20.	Saya berusaha menghindari pajak dengan cara tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWPD.					
21.	Saya berusaha menghindari pajak dengan tidak menyampaikan SPTPD tepat pada waktunya.					
22.	Saya tidak menyampaikan SPTPD secara benar agar jumlah pajak menjadi rendah.					
23.	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPTPD.					
24.	Saya tidak menyetorkan jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut terlebih dahulu ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang akan tetapi digunakan untuk keperluan lainnya.					
25.	Saya menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPTPD.					
26.	Saya berusaha memperkecil jumlah pajak dengan menyuap petugas pajak.					
27.	Saya berusaha melakukan penyuapan pajak melalui makelar.					
28.	Saya berusaha melakukan penyuapan pajak dengan mengatakan secara terang-terangan.					
29.	Saya berusaha mengurangi beban pajak dengan memberikan hadiah kepada fiskus.					

### Lampiran 3

**Tabel Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test***

#### Validitas

##### KTK

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X1.1	0.745	0.000	0.279	Valid
X1.2	0.838	0.000	0.279	Valid
X1.3	0.822	0.000	0.279	Valid
X1.4	0.298	0.035	0.279	Valid

##### KP

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X2.1	0.742	0.000	0.279	Valid
X2.2	0.830	0.000	0.279	Valid
X2.3	0.625	0.000	0.279	Valid
X2.4	0.460	0.001	0.279	Valid
X2.5	0.682	0.000	0.279	Valid
X2.6	0.447	0.001	0.279	Valid
X2.7	0.598	0.000	0.279	Valid

##### TSP

Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
X3.1	0.698	0.009	0.279	Valid
X3.2	0.691	0.000	0.279	Valid
X3.3	0.791	0.000	0.279	Valid
X3.4	0.708	0.000	0.279	Valid
X3.5	0.699	0.000	0.279	Valid
X3.6	0.683	0.000	0.279	Valid

##### TE

Item	Nilai r Hitung	Sig.	Nilai r Tabel	Keterangan
Y1	0.661	0.000	0.279	Valid
Y2	0.843	0.000	0.279	Valid
Y3	0.844	0.000	0.279	Valid
Y4	0.830	0.000	0.279	Valid
Y5	0.620	0.000	0.279	Valid
Y7	0.895	0.000	0.279	Valid
Y8	0.849	0.000	0.279	Valid
Y9	0.738	0.000	0.279	Valid
Y10	0.737	0.000	0.279	Valid

**Reliabilitas**

No.	Variabel	Koefisien Relabilitas	Keterangan
1.	X1	0.660	Reliabel
2.	X2	0.743	Reliabel
3.	X3	0.803	Reliabel
4.	Y	0.782	Reliabel

**Lampiran 4: Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan (X<sub>1</sub>)**

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,277*	,383**	,447**	,858**
	Sig. (2-tailed)		,023	,001	,000	,000
	N	67	67	67	67	67
X1.2	Pearson Correlation	,277*	1	,605**	,315**	,619**
	Sig. (2-tailed)	,023		,000	,009	,000
	N	67	67	67	67	67
X1.3	Pearson Correlation	,383**	,605**	1	,344**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,004	,000
	N	67	67	67	67	67
X1.4	Pearson Correlation	,447**	,315**	,344**	1	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000	,009	,004		,000
	N	67	67	67	67	67
X1	Pearson Correlation	,858**	,619**	,681**	,710**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	67	67	67	67	67

**Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Kecenderungan Personal (X<sub>2</sub>)**

Correlations								
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
X2.1 Pearson Correlation	1	,447**	,148	,237	,254*	,279*	,147	,633**
Sig. (2-tailed)		,000	,232	,053	,038	,022	,234	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.2 Pearson Correlation	,447**	1	,153	,336**	,052	,323**	-,083	,619**
Sig. (2-tailed)	,000		,218	,005	,678	,008	,506	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.3 Pearson Correlation	,148	,153	1	,067	,314**	,251*	,048	,495**
Sig. (2-tailed)	,232	,218		,590	,010	,040	,699	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.4 Pearson Correlation	,237	,336**	,067	1	,193	,287*	,076	,585**
Sig. (2-tailed)	,053	,005	,590		,119	,019	,538	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.5 Pearson Correlation	,254*	,052	,314**	,193	1	,251*	,400**	,536**
Sig. (2-tailed)	,038	,678	,010	,119		,041	,001	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.6 Pearson Correlation	,279*	,323**	,251*	,287*	,251*	1	,363**	,707**
Sig. (2-tailed)	,022	,008	,040	,019	,041		,003	,000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2.7 Pearson Correlation	,147	-,083	,048	,076	,400**	,363**	1	,404**

	Sig. (2-tailed)	,234	,506	,699	,538	,001	,003		,001
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
X2	Pearson Correlation	,633**	,619**	,495**	,585**	,536**	,707**	,404**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



**Lampiran 6: Hasil Uji Validitas Teknologi Sistem Perpajakan (X<sub>3</sub>)**

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,121	,168	,041	,127	,378**	,318**
	Sig. (2-tailed)		,329	,175	,742	,306	,002	,009
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3.2	Pearson Correlation	,121	1	,737**	,661**	,668**	,099	,819**
	Sig. (2-tailed)	,329		,000	,000	,000	,427	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3.3	Pearson Correlation	,168	,737**	1	,898**	,746**	,104	,923**
	Sig. (2-tailed)	,175	,000		,000	,000	,403	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3.4	Pearson Correlation	,041	,661**	,898**	1	,824**	,045	,901**
	Sig. (2-tailed)	,742	,000	,000		,000	,720	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3.5	Pearson Correlation	,127	,668**	,746**	,824**	1	,076	,878**
	Sig. (2-tailed)	,306	,000	,000	,000		,541	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3.6	Pearson Correlation	,378**	,099	,104	,045	,076	1	,261*
	Sig. (2-tailed)	,002	,427	,403	,720	,541		,033
	N	67	67	67	67	67	67	67
X3	Pearson Correlation	,318**	,819**	,923**	,901**	,878**	,261*	1

Sig. (2-tailed)	,009	,000	,000	,000	,000	,033	
N	67	67	67	67	67	67	67

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Lampiran 7: Hasil Uji Validitas *Tax Evasion* (Y)**

Correlations											
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y7	Y8	Y9	Y10	Y
Y1	Pearson Correlation	1	,182	,178	,382**	,080	,320**	,418**	,312*	,368**	,545**
	Sig. (2-tailed)		,140	,151	,001	,521	,008	,000	,010	,002	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y2	Pearson Correlation	,182	1	,659**	-,169	,117	,093	,094	-,030	,162	,654**
	Sig. (2-tailed)	,140		,000	,171	,345	,456	,449	,811	,191	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y3	Pearson Correlation	,178	,659**	1	-,010	,090	,179	,086	,059	,153	,701**
	Sig. (2-tailed)	,151	,000		,934	,467	,148	,489	,638	,216	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y4	Pearson Correlation	,382**	-,169	-,010	1	,195	,296*	,339**	,222	,252*	,350**
	Sig. (2-tailed)	,001	,171	,934		,113	,015	,005	,071	,040	,004
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y5	Pearson Correlation	,080	,117	,090	,195	1	,031	,135	,043	,024	,426**
	Sig. (2-tailed)	,521	,345	,467	,113		,805	,275	,728	,848	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y7	Pearson Correlation	,320**	,093	,179	,296*	,031	1	,642**	,460**	,695**	,534**
	Sig. (2-tailed)	,008	,456	,148	,015	,805		,000	,000	,000	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y8	Pearson Correlation	,418**	,094	,086	,339**	,135	,642**	1	,755**	,692**	,593**
	Sig. (2-tailed)										
	N										

	Sig. (2-tailed)	,000	,449	,489	,005	,275	,000		,000	,000	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y9	Pearson Correlation	,312*	-,030	,059	,222	,043	,460**	,755**	1	,615**	,449**
	Sig. (2-tailed)	,010	,811	,638	,071	,728	,000	,000		,000	,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y10	Pearson Correlation	,368**	,162	,153	,252*	,024	,695**	,692**	,615**	1	,571**
	Sig. (2-tailed)	,002	,191	,216	,040	,848	,000	,000	,000		,000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Y	Pearson Correlation	,545**	,654**	,701**	,350**	,426**	,534**	,593**	,449**	,571**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,004	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).